

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2025



**STASIUN PSDKP BIAK**



[psdkp.biak@kkp.go.id](mailto:psdkp.biak@kkp.go.id)



<https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>



(0981) 8211818

**2025** LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
**KINERJA**  
STASIUN PSDKP BIAK  
TRIWULAN IV  
TAHUN 2025



# **STASIUN PENGAWASAN**

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan oleh  
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2025

Penyusun:  
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2025

## **STASIUN PSDKP BIAK**

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa  
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156  
Telp.(0981) 8211818  
Pos Elektronik :psdkp.biak@kcp.go.id

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	I
KATA PENGANTAR.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	III
PROFIL PIMPINAN .....	V
I. PENDAHULUAN .....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP .....	3
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	9
2.2 Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025 .....	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.1 Efisiensi .....	64
VI. Penutup .....	67
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Rekomendasi .....	67
LAMPIRAN.....	68

**KATA PENGANTAR**

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi WPP 717 dan daratan yang mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun kelima pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 2025-2029 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada awal Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 sasaran kegiatan dengan 9 IKU dan 9 IKM.

Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien.

Biak Numfor, 30 Januari 2026

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak

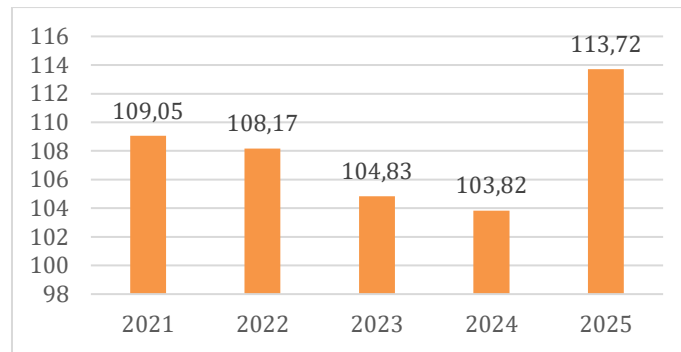


Mochamad Erwin



# RINGKASAN EKSEKUTIF

STASIUN PSDKP BIAK



**Gambar 1. NKO tahun 2021-2025**

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 6 sasaran kegiatan yang didukung oleh 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja Mandatori (IKM).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,72% dengan kategori “Istimewa”, serta menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh sasaran kegiatan berhasil dicapai, bahkan sebagian besar melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, operasi armada pengawasan, penanganan pelanggaran administratif dan pidana, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Kinerja pengawasan pada tahun 2025 difokuskan untuk mendukung kebijakan ekonomi biru dan agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi pengawasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur, budidaya laut dan pesisir, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran laut dan sampah plastik. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh penguatan pengawasan berbasis risiko, pemanfaatan data dan informasi intelijen pengawasan, optimalisasi sarana prasarana pengawasan, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi internal dan eksternal yang efektif.

Secara keseluruhan, kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan konsisten, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target kinerja serta pengelolaan pengawasan yang efektif dan efisien. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas kinerja pada Tahun 2026, diperlukan penguatan penajaman indikator dan target kinerja agar lebih berorientasi pada kualitas dan dampak, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya operasional. Selain itu, penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci agar capaian kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan nilai tambah dan dampak nyata terhadap efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## PROFIL PIMPINAN

**Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)**

Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”



# PENDAHULUAN

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PSDKP 2025-2029.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*".

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan awal tahun 2025, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

### 1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap
  - Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenangan perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
  - Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
  - Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
  - Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
  - Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
  - Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
  - Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.
  - Pemasangan rumpon oleh kapal perikanan yang belum dilengkapi SIPR
2. Unit Usaha Budidaya Perikanan
  - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
  - Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
  - Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.
3. Pengelolaan limbah pada unit usaha perikanan dan non perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
  - Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
  - Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
  - Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
  - Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
  - Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada;
4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi
  - Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;

- Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
  - Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
  - Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
  - Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;
5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak
- Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
  - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
  - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
- Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
  - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
  - Eksploitasi mangrove;
  - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
- Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPR;L;
  - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



### AGENDA PRIORITAS KKP



#### 1.4 Data Umum Organisasi

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

## 2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja Nomor B.35/PSDKPSta.8/KP.440/I/2025, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi <sup>(1)</sup>Kepala Urusan Umum; <sup>(2)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; <sup>(3)</sup>Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; <sup>(4)</sup>Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan <sup>(5)</sup>Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

### a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

### b. Kepala Urusan Umum

Melakukan <sup>(1)</sup>Penyusunan rencana, program dan anggaran; <sup>(2)</sup>Pengelolaan kinerja; <sup>(3)</sup>Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; <sup>(4)</sup>pengelolaan sumber daya manusia aparatur; <sup>(5)</sup>Evaluasi dan pelaporan; <sup>(6)</sup>Pengelolaan organisasi dan tata laksana; <sup>(7)</sup>Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.

### c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan <sup>(1)</sup>Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; <sup>(2)</sup>Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; <sup>(3)</sup>Pengawasan pengusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; <sup>(4)</sup>Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; <sup>(5)</sup>Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES; dan <sup>(6)</sup>Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.

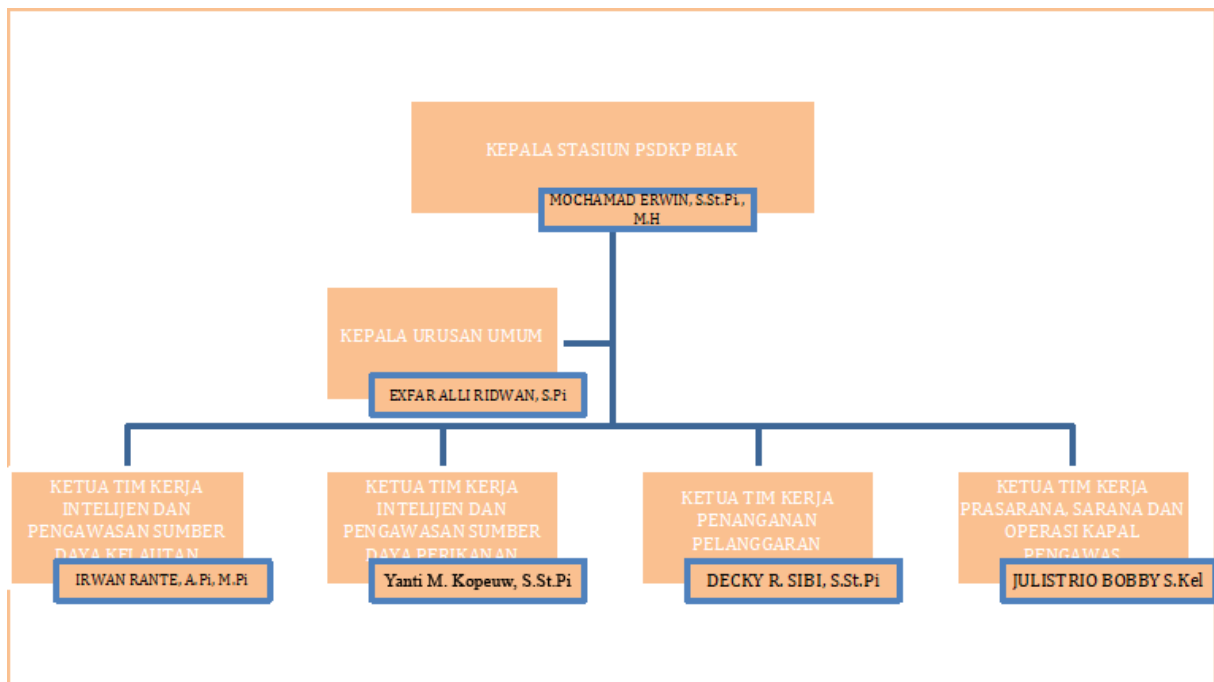
### d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan <sup>(1)</sup>Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; <sup>(2)</sup>Pengawasan penangkapan ikan terukur; <sup>(3)</sup>Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

### e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan <sup>(1)</sup>Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; <sup>(2)</sup>Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber

- daya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup>Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup>Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas Melaksanakan <sup>(1)</sup>Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; <sup>(2)</sup>Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; <sup>(3)</sup>Monitoring dan evaluasi prasarana, saran dan operasi kapal pengawas; <sup>(4)</sup>Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistik kapal pengawas; <sup>(5)</sup>Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak**

### 1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak TW IV 2025 diuraikan sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

#### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW IV Tahun 2025.

#### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



# PERENCANAAN KINERJA

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; <sup>(3)</sup> Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(4)</sup> Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Stasiun PSDKP Biak senantiasa berpedoman pada Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan [nilai]	82
SK. 2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	02 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan [nilai]	82
SK. 3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	03 Indeks operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	92
		04 Indeks operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	92
		05 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP [%]	80
SK. 5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran	06 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA		TARGET
	administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	07	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	81
SK. 6	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	08	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	81
SK. 7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	09	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak [nilai]	71,5
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak [nilai]	92
		11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	81
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	86
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak [indeks]	100
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [%]	95
		15	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak [nilai]	80
		16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak [nilai]	75
		17	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak [nilai]	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja [nilai]	70

## 2.2 Pengukuran Kinerja TW IV Tahun 2025

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.





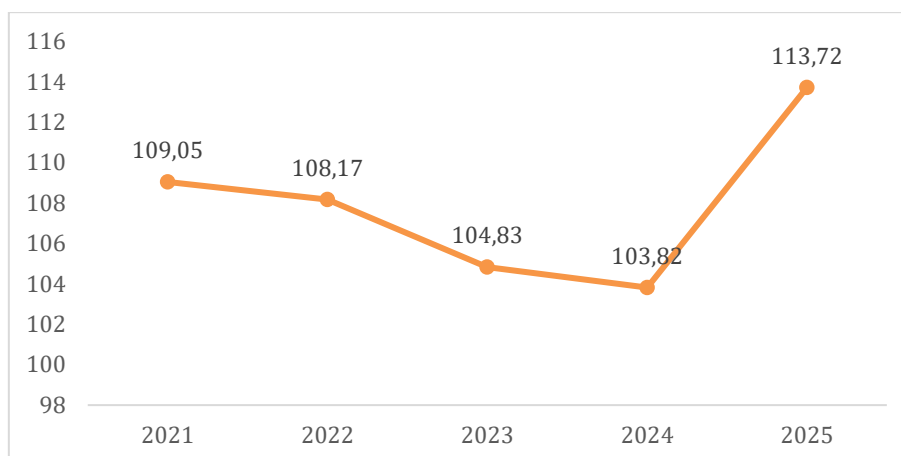
# AKUNTABILITAS K I N E R J A

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan sasaran pada awal tahun 2025 merupakan ekspektasi yang harus dicapai Stasiun PSDKP Biak. Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 6 Sasaran Kegiatan (SK), yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Mandatori (IKM). Triwulan IV 2025, pemenuhan ekspektasi kerja dilakukan sepanjang periode berjalan. Periode ini, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja sebesar 113,72% dengan kategori "**Istimewa**". Trend capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya.

Trend kinerja sejak tahun 2021 terus mengalami penerunan sampai dengan tahun 2024, pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya evaluasi dan pengendalian kinerja yang berkelanjutan. Trend kinerja pada Stasiun PSDKP Biak selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada Gambar 3.



**Gambar 3. Trend kinerja Stasiun PSDKP Biak**

#### SK. 1 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

##### *IKU 01. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan*

Sasaran kegiatan *terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan* didukung oleh indikator kinerja utama **nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan**. Indikator kinerja ini merupakan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Komponen indikator terdiri dari: <sup>(1)</sup>nilai penyelesaian pengawasan OSS, <sup>(2)</sup>nilai penyelesaian pengawasan selain OSS, <sup>(3)</sup>nilai penyelesaian pengawasan insidental.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp64,036,000 (enam puluh empat juta tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode berakhir senilai

Rp63,984,850 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,92%.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan mencapai nilai 100 sebagaimana disajikan Tabel 2, sehingga melampaui target tahunan sebesar 82 dengan tingkat capaian 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sangat efektif dan berada di atas standar kinerja yang direncanakan, serta mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kegiatan pengawasan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dalam perspektif lima tahun terakhir, kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan yang kuat. Realisasi kinerja tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024, dan dalam kurun waktu 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang telah mencapai titik optimal sejak tahun 2022 dan dapat dipertahankan hingga tahun berjalan. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan telah efektif dan berkelanjutan, serta mampu menjaga kualitas kinerja secara stabil dari tahun ke tahun.

**Tabel 2. Realisasi kinerja pengawasan sumber daya kelautan**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82-86	82	100	100	100	100	95

Realisasi indikator Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan pada tahun 2025 telah melampaui target nilai jangka menengah Renstra 2025–2029 sebesar 86 pada periode akhir, sehingga capaian kinerja berada pada posisi lebih cepat dari rencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan telah melampaui tingkat yang ditargetkan dalam Renstra, sehingga diperlukan upaya menjaga konsistensi kinerja serta penyesuaian target tahunan agar tetap realistis dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan yang berkelanjutan.

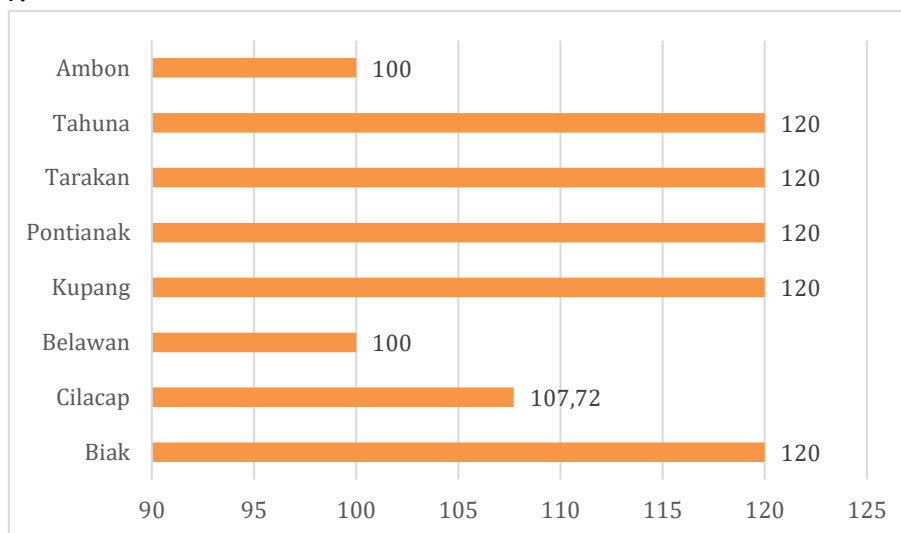
**Tabel 3. Capaian pengawasan sumber daya kelautan**

Sasaran/Indikator Kinerja	capaian				
	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>105.26</b>
Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	120	100	100	100.00	105.26

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin optimalnya pelaksanaan patroli pengawasan, peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran, serta respons yang lebih cepat dan tepat terhadap laporan masyarakat. Selain itu, kegiatan pengawasan telah dilaksanakan dengan mengacu pada peta kerawanan dan data intelijen pengawasan, sehingga sasaran operasi pengawasan menjadi

lebih terarah, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan sumber daya kelautan.

Jika dibandingkan dengan UPT lain, capaian Stasiun PSDKP Biak setara dengan beberapa UPT yang juga mencapai kinerja optimal, seperti Kupang, Pontianak, Tarakan, dan Tahuna, yang masing-masing mencatat capaian sebesar 120%. Sementara itu, capaian Stasiun PSDKP Biak lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa UPT sejenis yang disajikan pada Gambar 4.



**Gambar 4. Capaian pengawasan SDK UPT sejenis**

Berdasarkan perbandingan capaian indikator nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan antar UPT sekelas, Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata capaian UPT sebesar 113,465% dengan selisih 6,535%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan di Stasiun PSDKP Biak telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengawasan perikanan secara nasional.

Pencapaian kinerja yang melebihi target tersebut didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, ketersediaan peta kerawanan dan data intelijen pengawasan yang memadai sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan operasi pengawasan. Kedua, kompetensi dan pengalaman sumber daya manusia, khususnya pengawas perikanan dan pengawas kelautan, yang semakin meningkat dan mampu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam pelaporan aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir dan perairan, yang turut memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Dari sisi pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja tersebut didukung oleh berbagai kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Kegiatan dimaksud meliputi pengawasan kawasan konservasi, pengawasan PKKPR, pengawasan jenis ikan yang dilindungi, pengawasan PWP3K, pengawasan jasa kelautan, serta pengawasan pencemaran. Seluruh kegiatan

tersebut saling melengkapi dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pengawasan sumber daya kelautan secara menyeluruh.

Ditinjau dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja sebesar 120 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun dukungan informasi pengawasan, mampu menghasilkan output yang melebihi target tanpa peningkatan penggunaan sumber daya yang signifikan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2025 dilakukan melalui pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan serta optimalisasi pemanfaatan personel dan sarana operasional pada setiap kegiatan pengawasan. Efisiensi dicapai dengan pengelompokan kegiatan pengawasan, penyesuaian pola penugasan personel, serta pemanfaatan sarana operasional secara maksimal, sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya dan tetap menjaga penggunaan anggaran secara terkendali.

Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, organisasi tetap perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan kinerja pada periode berikutnya. Evaluasi tersebut diarahkan pada upaya mempertahankan praktik baik yang telah berjalan, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas pengawasan sumber daya kelautan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2025, pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan telah dilaksanakan terhadap 34 lembaga yang menjadi objek pengawasan. Kegiatan pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan, sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Detail output pengawasan per triwulan IV 2025 sebagaimana Tabel 4.

**Tabel 4. Output pengawasan sumber daya kelautan**

No.	Uraian Kegiatan Pengawasan	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi	4	2	4	4	14
2.	Kesesuaian Kegiatan Pemnfaatan Ruang Laut	1	6	1	1	9
3.	Jenis Ikan yang Dilindungi	3	1	-	-	4
4.	Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	-	1	2	1	4
5.	Jasa Kelautan	-	1	-	-	1
6.	WP3K	-	-	-	2	2
<b>Total</b>						<b>34</b>

Berdasarkan hasil pengawasan, sebagian besar kegiatan difokuskan pada pengawasan kawasan konservasi, dengan jumlah objek pengawasan sebanyak 14 lembaga. Tingginya proporsi pengawasan pada aspek konservasi menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga kelestarian ekosistem laut serta memastikan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut/PKKPRL dilaksanakan terhadap 9 lembaga. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut telah memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta dilaksanakan sesuai dengan perizinan dan rencana tata ruang laut yang ditetapkan.

Pengawasan jenis ikan yang dilindungi (JID) dan pencemaran laut masing-masing dilakukan terhadap 4 lembaga. Pengawasan JID difokuskan pada pencegahan pemanfaatan dan perdagangan jenis ikan yang dilindungi, sementara pengawasan pencemaran difokuskan pada kapal perikanan bertujuan untuk mengendalikan potensi pencemaran laut yang dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan lingkungan perairan.

Selanjutnya, pengawasan pada sektor jasa kelautan dilakukan terhadap 1 lembaga, yang diarahkan untuk memastikan kegiatan jasa kelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dan perizinan yang berlaku. Adapun pengawasan terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dilaksanakan terhadap 2 lembaga, sebagai upaya memastikan kesesuaian pemanfaatan wilayah pesisir dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil pengawasan sumber daya kelautan tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan telah dilaksanakan secara menyeluruh dan terfokus pada aspek-aspek strategis pengelolaan kelautan. Komposisi objek pengawasan tersebut mencerminkan prioritas organisasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta mendorong pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan oleh Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 telah mendukung agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam perluasan kawasan konservasi laut serta pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui kegiatan pengawasan dan patroli yang terarah, pengawasan terhadap kawasan konservasi dan pemanfaatan ruang laut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mewujudkan pengelolaan pesisir yang tertib dan berkelanjutan.

## **SK. 2 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan**

### *IKU 02. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan*

Sasaran kegiatan *terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan* didukung oleh indikator kinerja utama **nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan**. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan upaya yang dilakukan oleh pengawas perikanan untuk memastikan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, meliputi:

- 1) Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single Submission*);
- 2) Pengawasan operasional kapal perikanan;
- 3) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB); dan
- 4) Jenis ikan dilindungi.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp50,500,000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode berakhir senilai Rp50,497,358 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 99,99%.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan mencapai nilai 100, sehingga melampaui target nilai tahunan sebesar 82 dengan tingkat capaian 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sangat efektif dan berada di atas standar kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan dalam perspektif lima tahun terakhir, realisasi kinerja indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi, di mana capaian 100 telah dipertahankan secara berkelanjutan sejak tahun 2021 hingga 2025. Kondisi capaian yang berada pada level maksimum secara terus-menerus ini mengindikasikan potensi stagnasi indikator, sehingga diperlukan evaluasi terhadap relevansi dan tingkat ambisi target kinerja, serta penajaman indikator agar pengukuran kinerja pada periode berikutnya tetap mampu merefleksikan peningkatan kualitas pengawasan secara progresif dan berkelanjutan.

**Tabel 5. Realisasi kinerja pengawasan sumber daya perikanan**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82-86	82	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan secara bertahap pada rentang nilai 82–86, capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui batas atas target Renstra. Kondisi ini menempatkan kinerja pengawasan pada posisi lebih cepat dari lintasan pencapaian Renstra. Namun demikian, capaian yang secara konsisten berada di atas rentang target Renstra juga mengindikasikan perlunya peninjauan dan penajaman target serta indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya, agar pengukuran kinerja tetap mampu merefleksikan peningkatan kualitas pengawasan secara progresif dan menghindari stagnasi capaian pada level maksimum.

**Tabel 6. Capaian pengawasan sumber daya perikanan**

Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	120	100	100	100.00	100.00

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja. Sepanjang tahun pelaporan, pengawasan telah dilaksanakan terhadap 11 lembaga sebagai objek pengawasan, serta didukung oleh pemeriksaan operasional kapal perikanan sebanyak 959 kali. Detail realisasi output pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha pemanfaatan sumber daya perikanan disajikan pada Tabel 7

**Tabel 7. Output pengawasan sumber daya perikanan**

No.	Uraian Kegiatan Pengawasan	Triwulan			
		I	II	III	IV
1.	Pengawasan rutin berbasis OSS		2		
2.	Pengawasan operasional kapal perikanan	325	308	358	326
3.	Pengawasan KPB		3		
4.	Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi			5	1

Tingginya intensitas pemeriksaan operasional kapal perikanan menunjukkan konsistensi pengawasan terhadap aktivitas penangkapan dan pendaratan ikan di wilayah kerja. Pengawasan operasional kapal perikanan dilaksanakan hanya pada 2 (dua) wilayah kerja yaitu di Biak dan Manokwari. Hal tersebut dikarenakan kapal penangkapan ikan yang izin pusat dan masuk dalam skema penangkapan ikan terukur (PIT) hanya berpangkalan di PPI Fandoi dan PPI Sanggeng.

Pelaksanaan pengawasan operasional kapal perikanan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, tetapi juga secara langsung mendukung dua agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertama, pengawasan ini mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur melalui pemeriksaan dan pengawasan terhadap pendaratan hasil tangkapan, sehingga volume dan jenis ikan yang didaratkan dapat terdata secara akurat dan sesuai ketentuan. Kedua, pengawasan operasional kapal perikanan juga mendukung upaya pengurangan sampah plastik di laut, melalui pemeriksaan terhadap sampah plastik yang dibawa dan didaratkan oleh kapal perikanan, sebagai bagian dari pengendalian pencemaran laut dari aktivitas perikanan.

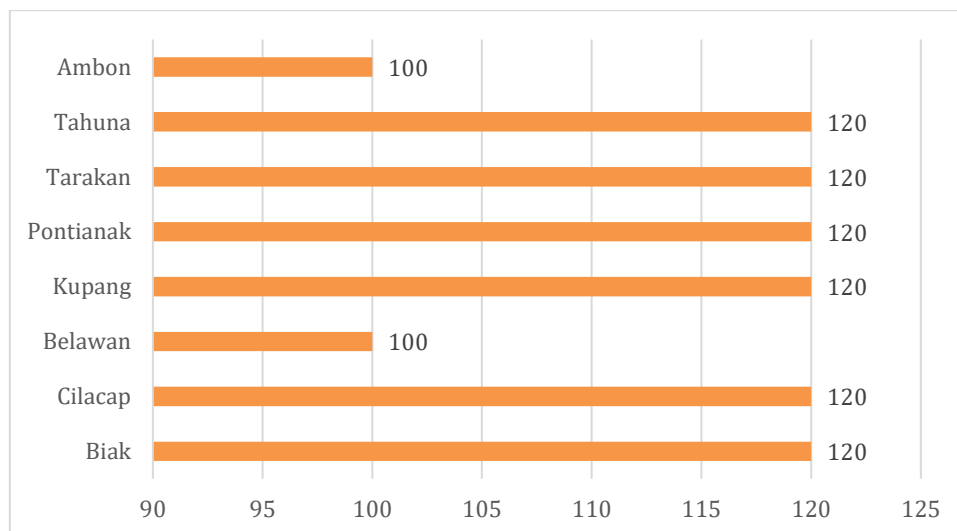
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan jumlah petugas pengawas perikanan pada Satwas SDKP Nabire, yang berpotensi membatasi cakupan pengawasan. Namun demikian, hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui intensitas koordinasi dengan instansi terkait serta keterlibatan aktif instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, yang menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan dilakukan melalui penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko yang selaras dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Efisiensi dicapai dengan mengoptimalkan pola operasi pengawasan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis teknologi dan data informasi. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dilaksanakan

untuk menghindari duplikasi kegiatan pengawasan. Seluruh pelaksanaan pengawasan dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap efisien dan terkendali, serta tetap mendukung ketercapaian output dan target IKU pengawasan sumber daya perikanan.

Secara keseluruhan, capaian pengawasan sumber daya perikanan tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara efektif, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan nasional, serta mampu mendukung pencapaian agenda prioritas KKP. Ke depan, penguatan jumlah dan kapasitas sumber daya pengawas diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pengawasan sumber daya perikanan.

Jika dibandingkan dengan UPT lain, capaian Stasiun PSDKP Biak sejajar dengan beberapa UPT yang mencapai kinerja optimal, yaitu Cilacap, Kupang, Pontianak, Tarakan, dan Tahuna, yang masing-masing mencatat capaian sebesar 120%. Sementara itu, capaian Stasiun PSDKP Biak lebih tinggi dibandingkan beberapa UPT lain sebagaimana disajikan pada Gambar 5.



**Gambar 5. Capaian pengawasan SDP UPT sekelas**

Berdasarkan perbandingan capaian indikator nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan antar UPT sekelas, Stasiun PSDKP Biak di atas rata-rata capaian UPT sebesar 115 persen dengan selisih 5%. Capaian tersebut menempatkan Stasiun PSDKP Biak sejajar dengan UPT berkinerja tertinggi, yaitu Cilacap, Kupang, Pontianak, Tarakan, dan Tahuna, sehingga menunjukkan kinerja pengawasan sumber daya perikanan yang efektif dan kompetitif dibandingkan UPT lainnya.

### **SK. 3 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif**

Sasaran kegiatan *terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif* didukung oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Indeks operasi kapal pengawas;
2. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas; dan

### 3. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp9,453,118,000 (sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode berakhir senilai Rp8,136,438,541 (delapan milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 86,07%.

Capaian sasaran kegiatan *terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif* pada tahun 2025 mencapai 111,8 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi armada pengawasan telah melampaui target tahunan 2025, sehingga sasaran kinerja dapat dikategorikan istimewa. Tingginya capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan operasi armada pengawasan dalam mendukung tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Apabila ditinjau berdasarkan tren capaian kinerja sejak tahun 2021, capaian sasaran kegiatan ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten. Pada tahun 2021 sasaran ini belum digunakan, sejak tahun 2022 mulai digunakan dengan capaian kinerja tercatat sebesar 117,04%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 109,4%. Pada tahun 2024, capaian kembali menurun menjadi 106,2%, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 111,8%. Detail capaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Capaian operasi armada pengawasan SDKP**

Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif</b>	<b>111,77</b>	<b>106,2</b>	<b>109,43</b>	<b>117,04</b>	
Indeks operasi kapal pengawas	105,22	109,89	112,59	120,00	
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	105,98	108,73	114,16	120,00	
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	120	100	100	100,00	

Secara keseluruhan, tren capaian kinerja sasaran SK.3 sejak tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan, serta menegaskan bahwa operasi armada pengawasan SDKP mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Ke depan, upaya optimalisasi pemanfaatan armada, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan dukungan operasional diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan capaian kinerja agar tetap selaras dengan rencana jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029.

#### *IKU 03. Indeks operasi kapal pengawas*

Indeks Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan

pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Kapal pengawas yang dioperasikan oleh Stasiun PSDKP Biak yaitu Kapal Pengawas Hiu Macan 04. Indikator kineja ini didukung oleh:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak lanjut target operasi yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan dan dukungan kegiatan SAR; serta
4. Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon illegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Indeks Operasi Kapal Pengawas mencapai 96,8 sebagaimana disajikan pada Tabel 9, sehingga melampaui target tahunan sebesar 92 dengan tingkat capaian 105,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas tetap berjalan efektif dan mampu melampaui standar kinerja yang direncanakan, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan sumber daya operasional. Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran yang memadai, baik yang bersumber dari rupiah murni maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pelaksanaan operasi kapal pengawas dapat berjalan secara optimal.

**Tabel 9. Realisasi indeks operasi kapal pengawas**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks operasi kapal pengawas	92-93	92	96,8	100	100	120	1,68

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 (96,8) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 dan 2023 yang masing-masing mencapai 100, serta lebih rendah dari capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 120. Namun demikian, secara tren lima tahun terakhir, kinerja Indeks Operasi Kapal Pengawas menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian awal tahun 2021 yang masih sangat rendah, dan pada tahun 2025 tetap berada di atas target yang ditetapkan. Penurunan capaian ini mencerminkan penyesuaian strategi operasi kapal pengawas yang lebih selektif dan berbasis prioritas, tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian kinerja.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 92–93, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 96,8 telah melampaui rentang target Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja operasi kapal pengawas berada di atas lintasan perencanaan Renstra (*ahead of schedule*). Namun demikian, capaian yang telah melampaui target jangka menengah sejak awal periode Renstra mengindikasikan perlunya penajaman target dan strategi operasional pada tahun-tahun berikutnya agar indikator tetap mampu menggambarkan peningkatan kinerja secara progresif dan berkelanjutan.

Realisasi komponen pendukung operasi kapal pengawas tahun 2025, yaitu terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan terealisasi sebanyak 248 kegiatan dari target 183 kegiatan, sedangkan Pemeriksaan Kelautan terealisasi 12 kegiatan dari target 8 kegiatan. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan mencapai 2,35%, melampaui target 1,52%, yang menunjukkan optimalisasi pemanfaatan operasi kapal pengawas. Sementara itu, Intercept Target terealisasi 9 kali sesuai target sebagaimana disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 10. Realisasi komponen pendukung operasi kapal**

Komponen	Target	Realisasi	Nilai
Pemeriksaan Kapal Perikanan	183	248	94,86
Pemeriksaan Kelautan	8	12	45
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan	1,52	2,35	45
Intercept Target	9	9	60

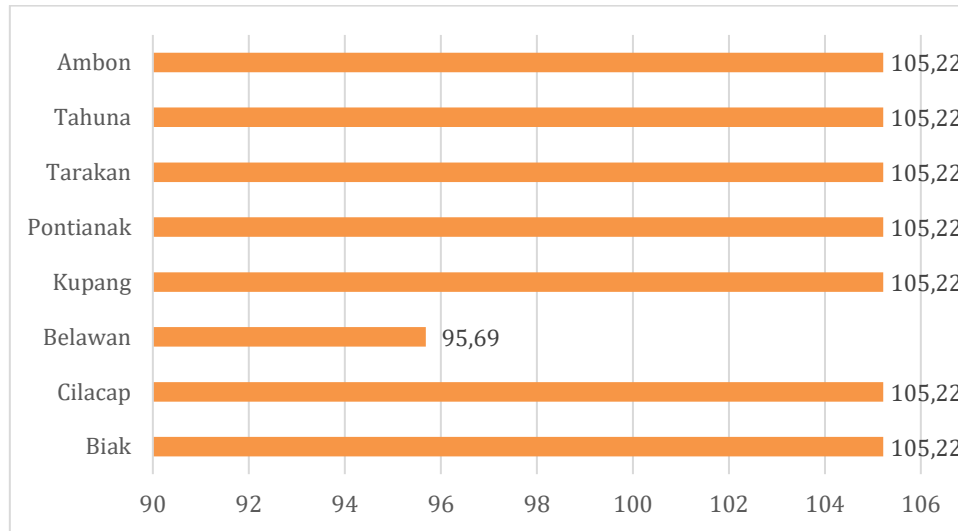
Pelaksanaan operasi kapal pengawas secara umum berjalan sesuai dengan rencana operasi tahunan yang telah ditetapkan. Intensitas patroli pengawasan laut dilaksanakan secara terencana dan terfokus pada wilayah rawan terjadinya pelanggaran, sehingga mampu menjangkau area prioritas pengawasan. Kondisi tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja, serta mendukung tercapainya target *indeks kinerja operasi kapal pengawas* pada tahun 2025.

Capaian kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan pengawasan laut sebagai salah satu prioritas strategis nasional, sehingga memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan operasi pengawasan. Selain itu, ketersediaan personel kapal pengawas yang kompeten dan berpengalaman turut berperan penting dalam menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan patroli.

Namun demikian, dalam pelaksanaan operasi kapal pengawas pada tahun 2025 masih dihadapkan pada faktor penghambat, khususnya terkait dengan usia kapal pengawas yang relatif sudah tua. Kondisi tersebut mempengaruhi keandalan teknis armada, terutama sering terjadinya gangguan dan kerusakan pada mesin genset, yang berpotensi menghambat keberlangsungan operasi patroli apabila tidak segera dilakukan penanganan dan pemeliharaan secara optimal.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya bahan bakar minyak (BBM), dilakukan melalui penerapan pola pengawasan yang berbasis analisis risiko dengan memfokuskan kegiatan patroli pada wilayah rawan pelanggaran. Penetapan rute patroli berbasis prioritas wilayah mampu mengurangi pergerakan kapal pengawas Hiu Macan 04 yang tidak efektif, sehingga jarak tempuh operasional dapat ditekan. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM per kegiatan pengawasan serta optimalisasi pemanfaatan alokasi BBM yang tersedia, tanpa mengurangi intensitas maupun kualitas pengawasan sumber daya perikanan yang dilaksanakan.

Secara nasional, mayoritas UPT menunjukkan capaian yang relatif seragam pada kisaran 105,22. Capaian Stasiun PSDKP Biak memiliki selisih positif sebesar 1,19 poin dibandingkan rata-rata UPT sekelas, menunjukkan kinerja yang kompetitif dan konsisten, serta berada pada kelompok UPT dengan capaian tinggi secara nasional. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan operasi kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 berjalan efektif dan optimal, serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara nasional. Garafik capaian UPT sekelas sebagaimana ditampilkan pada Gambar 6.



**Gambar 6. Capaian indeks operasi kapal pengawas pada UPT sekelas**

#### *IKU 04. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas*

Indeks Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Speedboat pengawas yang dioperasikan pada wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak sebanyak 2 unit yaitu Napoleon 041 dan Dolphin 016. Indikator kinerja ini didukung oleh:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Tindak lanjut target operasi yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan dan dukungan kegiatan SAR; serta
4. Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas mencapai 97,5, sehingga melampaui target tahunan sebesar 92 dengan tingkat capaian 105,98%. Capaian ini menunjukkan bahwa operasi speedboat pengawas dapat dilaksanakan secara efektif dan responsif,

khususnya dalam mendukung patroli pesisir dan perairan dangkal, meskipun dilaksanakan dalam kerangka pengendalian dan efisiensi sumber daya.

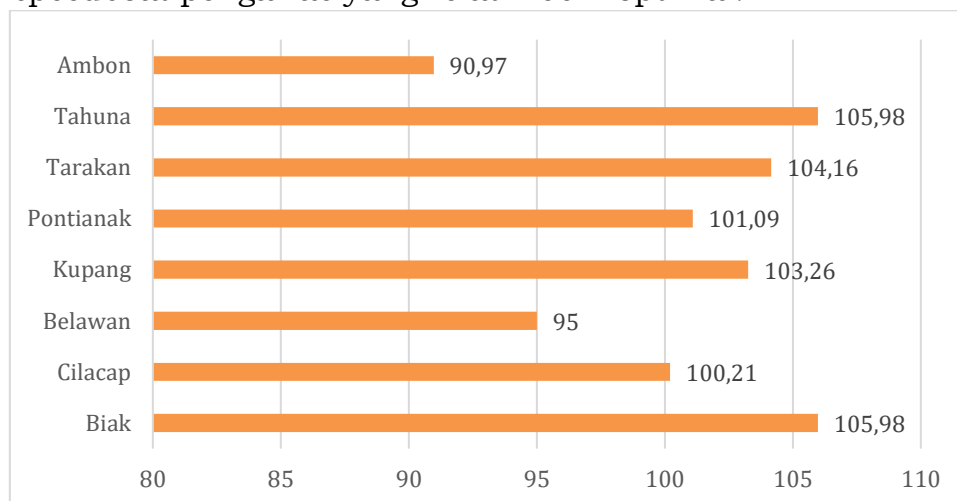
**Tabel 11. Realisasin indeks operasi speedboat**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92-93	92	97,5	98,9	100	116,5	0,04

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 (97,5) mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 (98,9) dan tahun 2023 (100), serta lebih rendah dibandingkan capaian tertinggi pada tahun 2022 (116,5). Namun demikian, secara tren lima tahun terakhir, kinerja operasi speedboat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan capaian awal tahun 2021 yang masih sangat rendah. Capaian tahun 2025 tetap berada di atas target kinerja dan menunjukkan stabilisasi kinerja pada level yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 92–93, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 97,5 telah melampaui rentang target Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja operasi speedboat pengawas berada di atas lintasan pencapaian Renstra (ahead of schedule). Namun demikian, capaian yang telah melampaui target jangka menengah sejak awal periode Renstra mengindikasikan perlunya penajaman target dan strategi operasi speedboat pada tahun-tahun berikutnya agar indikator tetap mampu mencerminkan peningkatan kinerja secara progresif dan menghindari stagnasi pada level capaian tertentu.

Secara nasional, capaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Stasiun PSDKP Biak sebesar 105,98% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya yang sebesar 100,83%, dengan selisih positif 5,15% (lihat Gambar 7). Hal ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai salah satu UPT dengan kinerja di atas rata-rata nasional dan menunjukkan pengelolaan operasi speedboat pengawas yang relatif lebih optimal.



**Gambar 7. Capaian indeks kinerja operasi speedboat pengawas UPT sekela**

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh kesiapsiagaan personel lapangan, sinergi dengan pengawas perikanan daerah, serta karakteristik speedboat yang efektif untuk pengawasan cepat di wilayah pesisir dan perairan dangkal. Di sisi lain, keterbatasan BBM operasional serta kondisi gelombang dan cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat yang memengaruhi intensitas operasi. Untuk menjaga stabilitas kinerja, organisasi telah melakukan optimalisasi rute patroli, penetapan prioritas wilayah pengawasan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan speedboat dilakukan melalui penetapan rute pengawasan yang berbasis prioritas wilayah rawan pelanggaran dan hasil informasi pengawasan. Perencanaan rute yang lebih terarah memungkinkan pergerakan armada menjadi lebih efektif, sehingga perjalanan yang tidak produktif dapat diminimalkan. Pendekatan ini berdampak langsung pada efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta optimalisasi waktu pengawasan di area sasaran, tanpa mengurangi intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas tahun 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya operasional telah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan Indonesia, pemeriksaan kelautan, serta peningkatan cakupan wilayah pengawasan WPPNRI memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pencapaian kinerja organisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 12. Realisasi komponen pendukung operasi speedboat**

Komponen		Target	Realisasi	Nilai
Pemeriksaan Kapal Perikanan	Napoleon 041	14	17	60,7
	Dolphin 016	9	9	50
Pemeriksaan Kelautan	Napoleon 041	2	3	75
	Dolphin 016	2	5	125
Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan	Napoleon 041	0,00009	0,00026	45
	Dolphin 016	0,00007	0,00009	45
Tindak Lanjut Target Operasi	Napoleon 041	0	0	0
	Dolphin 016	1	1	5

#### *IKU 05. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP*

Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1-unit kapal pengawas dan 2-unit speedboat pengawas, dinilai berdasarkan persentase kegiatan pemeliharaan

dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan untuk mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang selesai pemeliharaan dan perawatannya meliputi KP Hiu Macan 04, SB Napoleon 041, dan SB Dolphin 016.

Pada tahun 2025, realisasi indikator Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP mencapai 100, sehingga melampaui target tahunan sebesar 80 dengan tingkat capaian 120% (lihat Tabel 8). Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana pengawasan telah dilaksanakan secara optimal, mampu menjamin tingkat kesiapan operasional sarana pengawasan, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif.

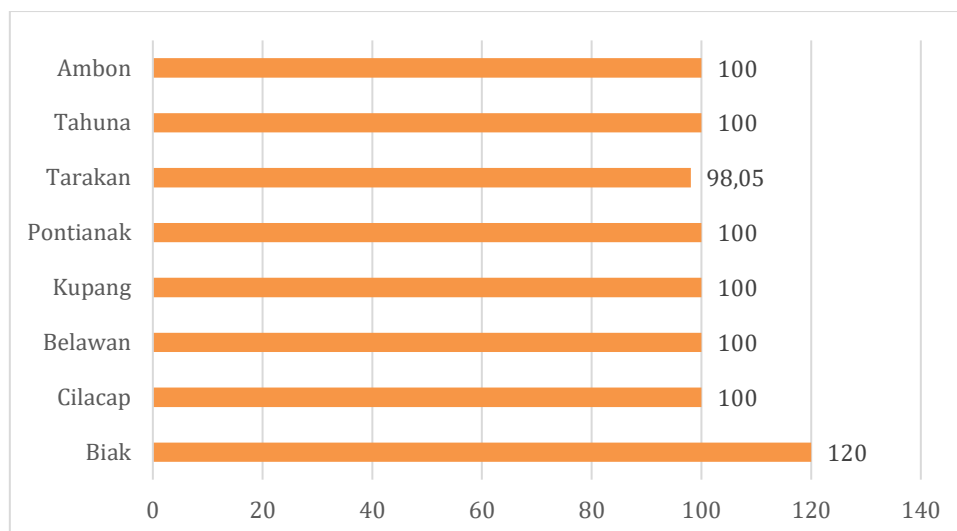
**Tabel 13. Realisasi kinerja pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	80	100	100	100	100	100

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 sama dengan capaian tahun 2024 dan konsisten dengan capaian pada tahun 2021 hingga 2023 yang juga mencapai 100. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan berkelanjutan, mencerminkan konsistensi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pengawasan yang telah berjalan sesuai standar dan mampu dipertahankan secara berkesinambungan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 100, realisasi kinerja tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra sejak awal periode perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana pengawasan berada pada tingkat kinerja yang optimal. Namun demikian, capaian yang konsisten berada pada nilai maksimum mengindikasikan perlunya peninjauan kembali indikator atau peningkatan standar kinerja pada periode berikutnya agar pengukuran kinerja tetap mampu mencerminkan upaya peningkatan kualitas dan efisiensi secara berkelanjutan.

Secara nasional, capaian Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Biak tercatat sebesar 120%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya sebesar 102,26%, dengan selisih positif 17,74 poin. Capaian ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai UPT dengan kinerja tertinggi secara nasional untuk indikator tersebut, sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan pemeliharaan sarana pengawasan dibandingkan UPT lainnya (lihat Gambar 8).



**Gambar 8. Capaian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UPT sekelas**

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan perawatan preventif secara berkala, monitoring kondisi mesin dan komponen kapal sebagai bagian dari perawatan prediktif, serta respons cepat tim teknis dalam menangani kebutuhan perbaikan darurat. Selain itu, dukungan teknisi internal dan pihak penyedia turut berperan dalam menjaga kelayakan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas. Namun demikian, pelaksanaan perawatan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ketersediaan sparepart di wilayah kerja serta keterbatasan anggaran perawatan rutin dan penggantian suku cadang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, organisasi telah melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan perawatan rutin bulanan, penyediaan suku cadang sebagai bagian dari perawatan prediktif, serta pelaksanaan perawatan darurat guna memastikan sarana pengawasan tetap siap digunakan. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemeliharaan dan perawatan prasarana serta sarana pengawasan SDKP telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan dan kualitas operasi pengawasan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Realisasi komponen pendukung persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP sebagaimana disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 14. Realisasi komponen pendukung pemeliharaan dan perawatan**

No.	Uraian	Realisasi
IKU 05.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100
1.	Perawatan pencegahan ( <i>preventive maintenance</i> )	50
2.	Perawatan prediktif ( <i>predictive maintenance</i> )	40
3.	Perawatan darurat ( <i>breakdown maintenance</i> )	10

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya operasional dalam pemeliharaan dan perawatan armada pengawas dilaksanakan melalui penerapan tiga pendekatan terpadu, yaitu perawatan rutin, perawatan prediktif, dan perawatan darurat. Perawatan rutin dilaksanakan secara berkala untuk menjaga performa dan kelayakan operasional armada, sehingga mampu meminimalkan potensi kerusakan yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan. Perawatan prediktif dilakukan melalui pengadaan dan penggantian suku cadang berdasarkan kebutuhan teknis dan umur pakai komponen, sehingga pergantian dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan berat. Pendekatan ini terbukti lebih efisien karena mencegah biaya perbaikan besar serta mengurangi risiko penghentian operasi yang tidak terencana. Sementara itu, perawatan darurat dilaksanakan secara selektif dan terukur guna memastikan armada dapat segera dioperasikan kembali tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya. Penerapan ketiga pendekatan tersebut secara terintegrasi berkontribusi pada optimalisasi pemanfaatan anggaran pemeliharaan serta peningkatan kesiapan armada dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP secara berkelanjutan.

### **SK. 5 Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**

Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang tuntas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu <sup>(1)</sup>Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak, dan <sup>(2)</sup>Indeks pemeriksaan Hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak. Sasaran ini digunakan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung meliputi:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta

Sasaran kegiatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp15,000,000 (lima belas juta rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode berakhir senilai Rp14,999,262 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 100%.

Sasaran kegiatan terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi kinerja juga mencapai 100%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses penanganan pelanggaran administratif telah dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 15. Capaian penanganan pelanggaran administratif**

Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>	100	100	120		
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	100	100	120		
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	120		

*IKU 06. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Indeks pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penegakan aturan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di Stasiun PSDKP Biak. Indeks ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, pelanggaran zona konservasi, atau pelanggaran terkait izin dan perizinan usaha perikanan. Sanksi administratif kelautan dan perikanan yang dapat ditetapkan berupa:

- a. pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b. pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Indikator indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan menggambarkan tingkat efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Indikator ini mencerminkan konsistensi penerapan sanksi administratif, tingkat kepatuhan pelaku usaha, serta kontribusinya dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pada tahun 2025, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 81, realisasi kinerja mencapai 81 (lihat Tabel 16), dengan tingkat capaian sebesar 100% (lihat Tabel 15).

Realisasi indikator Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 mencapai 81, relatif stabil dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 80, serta menunjukkan penyesuaian dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 100. Dalam perspektif beberapa tahun terakhir, kinerja indikator ini menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika jumlah dan karakteristik pelanggaran administratif yang ditangani. Capaian tahun 2025 mencerminkan konsistensi penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan,

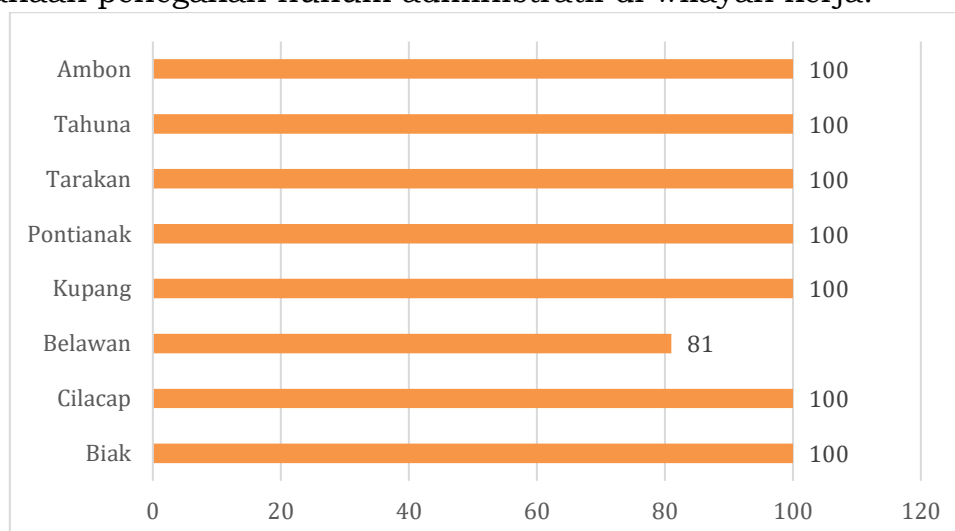
sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi tidak semata diukur dari tingginya angka capaian, tetapi juga dari proporsionalitas dan ketepatan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

**Tabel 16. Capaian indeks pengenaan sanksi administrative**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81-85	81	81	80	100		

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 sebesar 81 telah memenuhi batas bawah target Renstra yang ditetapkan pada rentang 81–85. Hal ini menandakan bahwa kinerja penegakan sanksi administratif telah berada pada level minimum yang diharapkan dalam periode Renstra. Namun demikian, capaian yang masih berada pada batas bawah rentang target mengindikasikan perlunya penguatan kualitas dan efektivitas penerapan sanksi administratif pada tahun-tahun berikutnya agar kinerja dapat bergerak menuju batas atas target Renstra serta lebih mencerminkan peningkatan dampak pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha.

Secara nasional, capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Biak tercatat sebesar 100, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya sebesar 97,63, dengan selisih positif 2,38 poin sebagaimana disajikan pada Gambar . Capaian ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai salah satu UPT dengan kinerja di atas rata-rata nasional, sekaligus menunjukkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum administratif di wilayah kerja.



**Gambar 9. Capaian penanganan sanksi administratif UPT sekelas**

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan penegakan hukum administratif, antara lain pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis (SP1) kepada dua lembaga/pelaku usaha di bidang kelautan, pengenaan sanksi denda kepada satu pelaku usaha yang

memanfaatkan ruang laut tanpa dilengkapi perizinan PKKPR dan izin reklamasi, serta pengenaan peringatan SP1 kepada satu kapal perikanan yang melakukan pelanggaran jalur penangkapan ikan. Pelaksanaan sanksi tersebut menunjukkan komitmen organisasi dalam menerapkan ketentuan secara konsisten dan proporsional.

Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan proses penyelesaian pelanggaran administratif terhadap 5 (lima) lembaga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pelanggaran administratif yang ditangani berupa pelanggaran administratif perikanan SPKP; pelanggaran administratif perikanan non SPKP; dan pelanggaran administratif kelautan. Realisasi pelanggaran administratif perikanan menjadi capaian pusat karena sampai pada tahapan denda. Stasiun PSDKP Biak hanya mengambil pelanggaran administratif kelautan yang berakhir pada sanksi peringatan pertama. Output pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

**Tabel 17. Output sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Biak**

Unit Kerja	Sanksi SDK	Sanksi SDP	Keterangan
<b>Biak</b>	1	1	1) KKPRL (SP1) 2) Non SPKP (Denda)
<b>Jayapura</b>	1		KKPRL (SP1)
<b>Manokwari</b>	1	1	1) KKPRL (Denda) 2) SPKP (Denda)
<b>Nabire</b>			

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai dengan melibatkan SDM yang berkompeten dalam bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan keputusan tidak mengalami tumpang tindih. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana sanksi dapat ditetapkan lebih cepat. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak telah berjalan efektif, terukur, dan akuntabel. Konsistensi penerapan sanksi administratif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

#### *IKU 07. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan*

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan mencerminkan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap orang atau pelaku usaha berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal yang menunjukkan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah hasil analisis pemeriksaan dari PUSDAL.

Pada tahun 2025, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target indeks yang ditetapkan sebesar 81, realisasi indeks mencapai 81 (lihat Tabel 18), dengan tingkat capaian sebesar 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 15. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh hasil analisis pemantauan yang menjadi objek pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga mendukung efektivitas pengawasan berbasis data dan informasi.

**Tabel 18. Capaian indeks pemeriksaan hasil pengawasan**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81-85	81	81	80	100		

Realisasi indikator Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 mencapai 81, relatif stabil dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 80, namun mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 100. Dalam perspektif beberapa tahun terakhir, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika jumlah dan kompleksitas hasil pemantauan yang dianalisis serta ditindaklanjuti. Capaian tahun 2025 mencerminkan bahwa proses pemeriksaan hasil analisis pemantauan tetap dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan, dan adanya peningkatan pola perhitungan.

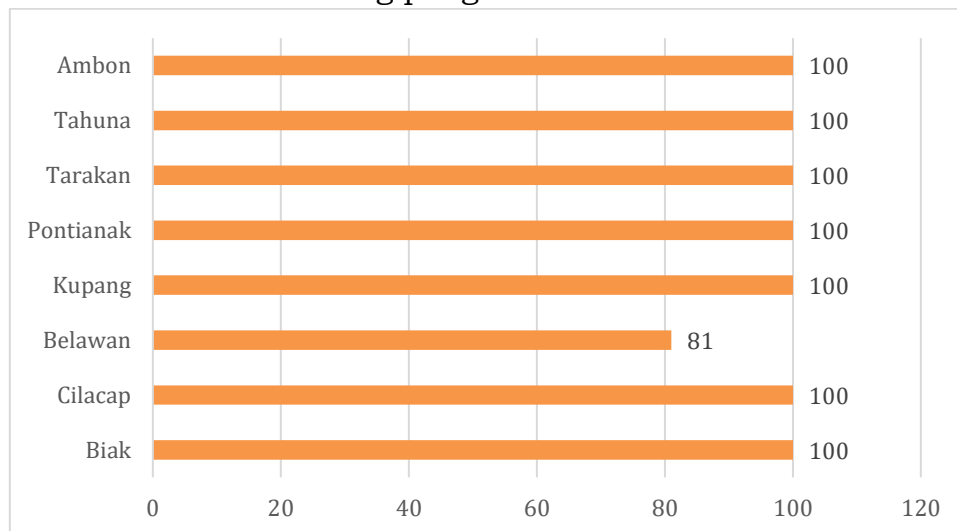
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 81–85, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 81 telah memenuhi batas bawah target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemeriksaan hasil analisis pemantauan telah berada pada level minimum yang diharapkan dalam periode Renstra. Namun demikian, capaian yang masih berada pada batas bawah rentang target mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan efektivitas pemeriksaan serta pemanfaatan hasil analisis pemantauan pada tahun-tahun berikutnya, agar kinerja dapat bergerak menuju batas atas target Renstra dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan data dari PUSDAL, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan tindak lanjut terhadap 6 (enam) kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Hasil tindak lanjut sebanyak 5 (lima) kapal bukan pelanggaran dan 1 (satu) melakukan pelanggaran SPKP. Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini mencerminkan komitmen pimpinan dan tim penanganan pelanggaran dalam menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan. Pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil analisis dari PUSDAL segera diperiksa dan dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim penanganan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai melalui pengumpulan bukti dukung secara sistematis, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat terfokus pada dokumen pendukung yang sudah tersedia. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dan BAP tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

Jika ditinjau dari capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, indikator ini menunjukkan kinerja yang konsisten dan stabil. Pada tahun 2023, capaian tercatat sebesar 120%, kemudian berada pada tingkat 100% pada tahun 2024 dan tetap 100% pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 10. Tren tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan hasil analisis pemantauan telah berjalan secara terstandar dan berkelanjutan, meskipun terdapat variasi jumlah dan kompleksitas kasus yang ditangani setiap tahunnya.

Secara nasional, capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Biak tercatat sebesar 100, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya sebesar 97,63, dengan selisih positif 2,38 poin (lihat Gambar 9). Capaian tersebut menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai salah satu UPT dengan kinerja di atas rata-rata nasional dalam pemanfaatan hasil analisis pemantauan untuk mendukung pengawasan.



**Gambar 10. Capaian pemeriksaan hasil analisis SPKP UPT sekelas**

Pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penegakan hukum administratif yang berbasis hasil analisis pemantauan, antara lain pengenaan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Pertama (SP1) kepada 10 kapal perikanan yang terbukti melakukan pelanggaran berupa tidak mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Tindak lanjut tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis pemantauan telah dimanfaatkan secara efektif sebagai dasar penegakan ketentuan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2025 menunjukkan bahwa pengawasan berbasis data dan analisis di wilayah kerja

Stasiun PSDKP Biak telah berjalan efektif, konsisten, dan akuntabel. Pemanfaatan hasil pemantauan secara optimal diharapkan dapat terus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

### **SK. 06 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**

#### *IKU 08. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan*

Sasaran kegiatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp66,418,000 (enam puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode berakhir senilai Rp66,415,204 (enam puluh enam juta empat ratus lima belas ribu dua ratus empat rupiah) atau sebesar 100%.

Sasaran kegiatan terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Sasaran ini didukung oleh indikator Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang mencapai 120%, melampaui target indeks tahunan yang ditetapkan sebesar 81 dengan realisasi indeks sebesar 100 sebagaimana pada Tabel 19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dilaksanakan secara optimal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 19. Realisasi indeks penyelesaian penyidikan TPKP**

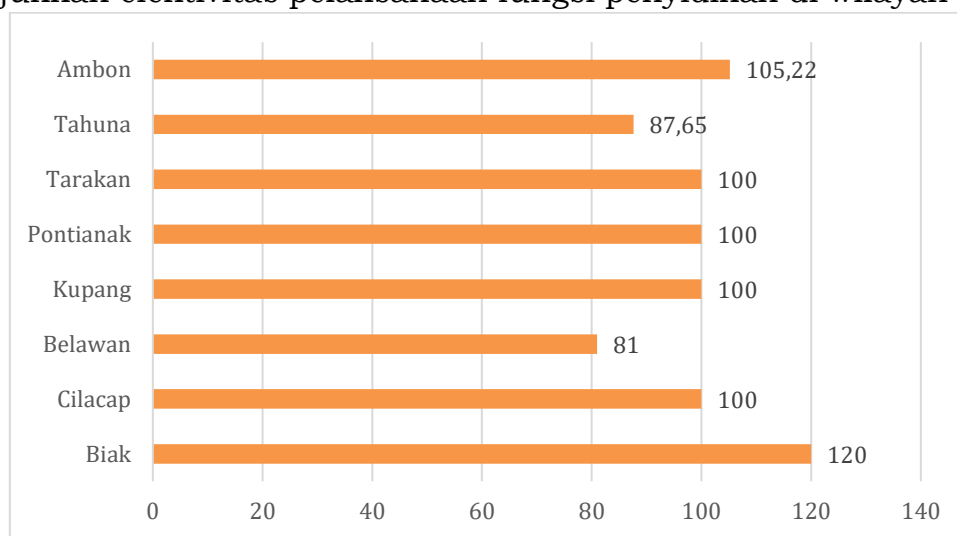
Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81-85	81	100	100	100		93

Realisasi Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar 100 menunjukkan kinerja yang konsisten dibandingkan capaian tahun 2024 dan 2023 yang juga berada pada nilai 100, serta lebih baik dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 93. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indikator ini memperlihatkan peningkatan dan stabilisasi kinerja pada tingkat optimal sejak tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses penyelesaian penyidikan telah dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan, baik dari aspek ketepatan waktu maupun penyelesaian administrasi perkara.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 81–85, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian penyidikan telah memenuhi bahkan melampaui standar yang direncanakan. Namun demikian, capaian yang secara konsisten berada di atas target Renstra perlu diikuti dengan evaluasi atas kesesuaian

target dan indikator, agar pengukuran kinerja pada periode berikutnya tetap mampu menggambarkan peningkatan kualitas penanganan perkara, kompleksitas kasus, serta efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan.

Secara nasional, capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan pada Stasiun PSDKP Biak tercatat sebesar 120, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya sebesar 99,23, dengan selisih positif yang signifikan sebesar 20,77 poin sebagaimana disajikan pada Gambar 10. Capaian ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai salah satu UPT dengan kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi penyidikan di wilayah kerja.



**Gambar 11. Capaian penyidikan TPKP UPT sekelas**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyidikan secara nyata, antara lain penyidikan terhadap dua kapal asing berbendera Filipina yang melakukan tindak pidana perikanan, yang seluruh perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Biak dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Selain itu, telah dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), yang dalam perkembangannya ditetapkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik dengan pertimbangan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (keadaan kahar). Penetapan SP3 tersebut menunjukkan bahwa penyidikan dilaksanakan secara profesional dengan mempertimbangkan aspek hukum, keamanan, dan stabilitas wilayah.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan prasarana pendukung, khususnya ruang penyimpanan barang bukti dan ketersediaan dermaga untuk tambat kapal hasil patroli tindak pidana perikanan. Keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi penanganan barang bukti dan pengelolaan kapal hasil penindakan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tahun 2025 dilakukan melalui pengaturan dan pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta waktu secara optimal. Dalam periode yang sama, penanganan dua perkara tindak pidana perikanan dapat dilaksanakan secara paralel dengan pengelolaan pembagian tugas penyidik yang terencana serta pengendalian anggaran yang proporsional. Pengaturan tersebut memungkinkan seluruh tahapan penyidikan diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya, sehingga menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyidikan TPKP.

Keberhasilan pelaksanaan penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tahun 2025 didukung oleh adanya supervisi dan pendampingan dari Direktorat Penanganan Pelanggaran (PP) melalui penambahan personel sumber daya manusia serta penguatan koordinasi lintas instansi. Koordinasi dilakukan secara intensif melalui pelaksanaan rapat gelar perkara yang melibatkan Kejaksaan Negeri Biak, serta koordinasi dengan Pengadilan Negeri Biak dan KPKNL Biak, khususnya dalam rangka percepatan proses lelang hasil tangkapan ikan yang bersifat mudah rusak. Langkah ini memastikan barang bukti tetap memiliki nilai ekonomis serta mendukung kelancaran dan kepatuhan proses penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran kegiatan dan indikator Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tahun 2025 menunjukkan bahwa fungsi penyidikan di Stasiun PSDKP Biak telah berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Capaian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah kerja.

#### **SK. 07 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan didukung 9 indikator kinerja. Pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran kegiatan ini mencapai nilai 110,55% sebagaimana disajikan pada Tabel, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja organisasi yang solid dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara menyeluruh.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp9,370,971,000 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode berakhir senilai Rp9,367,820,534 (sembilan milyar tiga ratus

enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 99,97%.

**Tabel 20. Capaian tata kelola pemerintahan yang baik**

Sasaran/Indikator Kinerja	Capaian				
	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</b>	<b>110,55</b>	<b>113,03</b>	<b>109,22</b>	<b>111,99</b>	<b>110,57</b>
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	120	120			
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	103,64	101,85	101,05	108,63	103,20
Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	108,25	106	115,12	106,52	108,53
Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	101,74	102,2	97,89		
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Biak	100	100	100		
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	105,26	120	100	120,00	
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	120	120	118,15	115,39	106,43
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak	117,2	119,04			
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	103,31	100	100	100,00	
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	118,14	115,79	120	120,00	

Jika ditinjau dari capaian beberapa tahun terakhir, kinerja sasaran kegiatan ini menunjukkan kondisi yang stabil dan konsisten pada kategori sangat baik. Capaian kinerja tercatat sebesar 113,03% pada tahun 2024, 109,22% pada tahun 2023, 111,99% pada tahun 2022, dan 110,57% pada tahun 2021. Fluktuasi capaian yang terjadi bersifat wajar dan menunjukkan dinamika pelaksanaan kegiatan, namun secara keseluruhan pada tahun 2025 seluruh indikator kinerja pendukung mencapai target.

#### *IK 09. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak mulai diterapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target nilai yang ditetapkan sebesar 71,5, realisasi nilai kinerja mencapai 89,77, dengan tingkat capaian sebesar 120% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran di lingkungan Stasiun PSDKP Biak telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui standar yang ditetapkan.

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 mencapai nilai 89,8, mengalami penurunan signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 96,2 dan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 85,8, tahun 2022 sebesar 85,99, serta tahun 2021 sebesar 86 sebagaimana disajikan pada Tabel 21. Secara tren lima tahun terakhir, kinerja perencanaan anggaran menunjukkan pola yang relatif stabil dengan fluktuasi moderat, serta pada tahun 2025 berada pada tingkat kinerja yang lebih baik dibandingkan sebagian besar capaian tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya upaya mempertahankan kualitas perencanaan anggaran, khususnya dalam aspek konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

**Tabel 21. Realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	71,5- 82,5	71,5	89,8	96,2	85,8	85,99	86

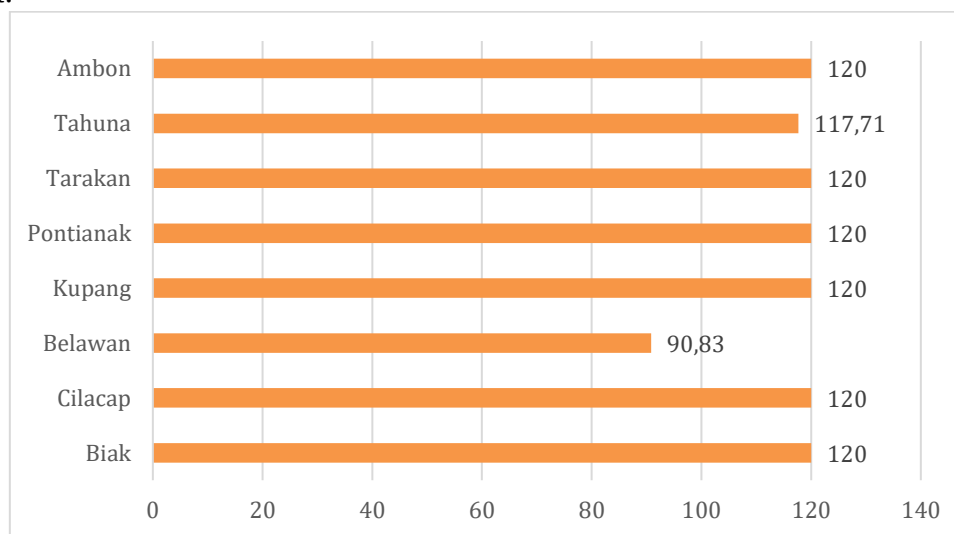
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 71,5–82,5, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 89,8 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran telah berada di atas standar kinerja yang direncanakan dalam dokumen strategis. Namun demikian, capaian yang melampaui target jangka menengah sejak awal periode Renstra mengindikasikan perlunya peninjauan kembali tingkat ambisi target dan indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya, agar pengukuran kinerja tetap mampu mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika kebijakan fiskal.

Pelaksanaan perencanaan anggaran pada Stasiun PSDKP Biak menunjukkan kinerja yang efektif dengan tingkat capaian Rincian Output (RO) sebesar 100, yang menandakan seluruh output kegiatan telah tercapai sesuai perencanaan. Dari sisi efisiensi, penggunaan Standar Biaya Keluaran

(SBK) mencapai nilai 72,73, yang menunjukkan pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara cukup efisien meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Sementara itu, efisiensi SBK sebesar 50 mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan biaya agar lebih proporsional dan berbasis kinerja, sehingga pada periode berikutnya efektivitas capaian output dapat tetap terjaga seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil penilaian, kinerja perencanaan anggaran Stasiun PSDKP Biak tergolong baik, yang ditunjukkan oleh tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan, seperti Renja dan RKA-KL, dengan pelaksanaan anggaran serta keterkaitannya dengan target kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara selaras dengan kebutuhan operasional dan prioritas kinerja organisasi.

Secara nasional, capaian indikator ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak pada posisi di atas rata-rata UPT PSDKP lainnya. Nilai capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 120% lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian UPT sebesar 116,07%, dengan selisih positif 3,93 poin (lihat Gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar satuan kerja lainnya.



**Gambar 12. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran**

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman perencana terhadap tugas dan fungsi organisasi, ketersediaan pedoman dan sistem perencanaan yang jelas, koordinasi internal yang cukup efektif, serta komitmen pimpinan satuan kerja dalam mengawal kualitas perencanaan dan penganggaran. Dukungan faktor-faktor tersebut memungkinkan perencanaan anggaran disusun secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil pelaksanaan tugas.

Namun demikian, pelaksanaan perencanaan anggaran masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan fleksibilitas perencanaan, keterbatasan data pendukung berbasis kinerja, keterbatasan

kapasitas SDM perencanaan, serta pengaruh kebijakan pusat dan refocusing anggaran. Kendala tersebut memerlukan penyesuaian dan penguatan berkelanjutan agar kualitas perencanaan anggaran dapat terus ditingkatkan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator ini, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi anggaran, revisi anggaran berbasis kebutuhan lapangan, koordinasi dan pembinaan internal, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan anggaran. Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak tahun 2025 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dikelola secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### *IK 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat) yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Pada tahun 2025, capaian IKPA Stasiun PSDKP Biak menunjukkan kinerja yang baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 92, realisasi kinerja mencapai 95,35, dengan tingkat capaian sebesar 103,64% yang disajikan pada Tabel 14. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan efektif dan memenuhi sebagian besar indikator penilaian IKPA.

Jika ditinjau dari capaian kinerja beberapa tahun terakhir, IKPA Stasiun PSDKP Biak menunjukkan tren yang relatif stabil dan konsisten pada kategori baik. Capaian kinerja tercatat sebesar 103,20% pada tahun 2021, meningkat menjadi 108,63% pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 101,05% pada tahun 2023, 101,85% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 103,64% pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan operasional dan tantangan pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan, namun secara keseluruhan tetap berada di atas target yang ditetapkan.

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 mencapai 95,4, relatif stabil dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 95,5, dan lebih baik dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 94,7 serta tahun 2021 sebesar 89. Jika dilihat dalam perspektif lima tahun terakhir, kinerja IKPA menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2022 yang mencapai 96,68 sebagai capaian tertinggi sebagaimana disajikan pada Tabel 22. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 mencerminkan

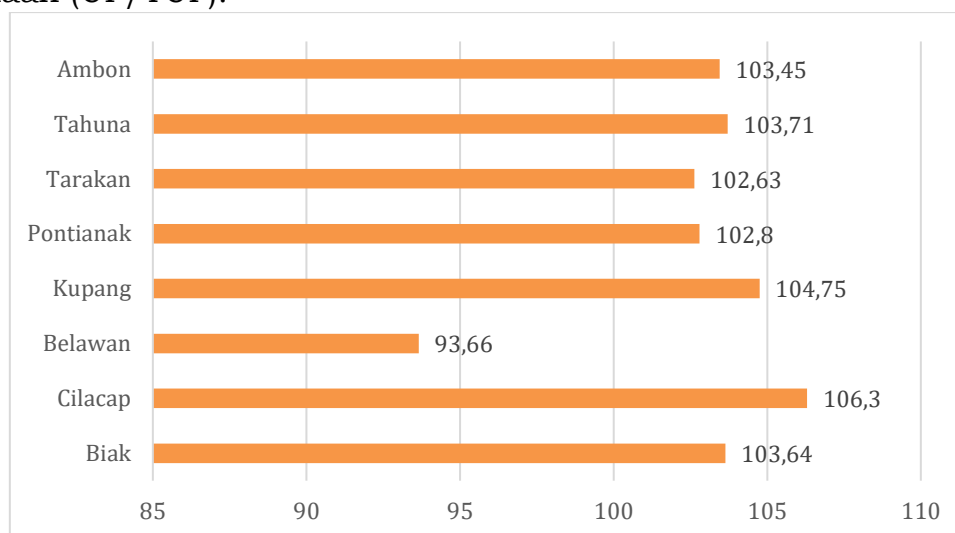
kemampuan satuan kerja dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan.

**Tabel 22. Realisasi indeks kinerja pelaksanaan anggaran**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92-92,2	92	95,4	95,5	94,7	96,68	89

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 92–92,2, realisasi IKPA tahun 2025 sebesar 95,4 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran berada di atas standar yang direncanakan dalam dokumen strategis. Namun demikian, capaian yang secara konsisten berada di atas target jangka menengah mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian target IKPA pada periode berikutnya agar indikator tetap mampu mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran secara progresif dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Secara nasional, capaian IKPA Stasiun PSDKP Biak sebesar 103,64% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP sebesar 102,62%, dengan selisih positif 1,02 poin (lihat Gambar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan rata-rata satuan kerja sejenis, khususnya dalam aspek penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan Uang Persediaan (UP/TUP).



**Gambar 13. Capaian IKPA UPT sejenis**

Berdasarkan hasil penilaian IKPA, sebagian besar indikator pelaksanaan anggaran telah memenuhi target, terutama pada aspek penyerapan anggaran, ketepatan penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP/TUP. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai nilai maksimal, khususnya terkait kualitas perencanaan anggaran dan konsistensi pelaksanaan terhadap perencanaan awal, yang tercermin

dari belum optimalnya nilai Deviasi Halaman III DIPA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun realisasi anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, masih terdapat ruang perbaikan dalam ketepatan perencanaan dan penjadwalan kegiatan. Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 11.84 dari bobot nilai 15. Hal ini menyebabkan kualitas perencanaan anggaran lebih rendah dibandingkan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Keberhasilan capaian IKPA ini didukung oleh koordinasi internal yang cukup baik antara pengelola keuangan, pejabat perbendaharaan, dan pelaksana kegiatan, serta komitmen pimpinan satuan kerja dalam mendorong percepatan realisasi anggaran dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaksanaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan aplikasi OMSPAN dan SAKTI secara optimal, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, turut mendukung kualitas pelaksanaan anggaran.

Di sisi lain, pelaksanaan anggaran masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain perubahan kebutuhan operasional dan dinamika lapangan di wilayah kerja yang luas dan menantang, penyesuaian jadwal kegiatan yang berdampak pada revisi perencanaan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat faktor cuaca dan kondisi geografis, serta keterbatasan SDM pengelola keuangan yang harus menangani beberapa fungsi secara bersamaan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain penyusunan dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, percepatan pelaksanaan kegiatan operasional pengawasan, peningkatan disiplin administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi internal setiap triwulan, serta koordinasi intensif dengan KPPN dan unit pembina terkait pengelolaan anggaran dan tindak lanjut hasil evaluasi IKPA. Secara keseluruhan, capaian IKPA tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Stasiun PSDKP Biak telah berjalan cukup efektif dan memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### *IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN, yang mencerminkan kualitas SDM aparatur dalam mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik. Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 81, realisasi kinerja mencapai 87,68, dengan tingkat capaian sebesar 108,25% sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Capaian tersebut menempatkan IPASN Stasiun PSDKP Biak pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa profesionalitas ASN telah berjalan secara optimal.

Jika ditinjau dari capaian beberapa tahun terakhir, kinerja IPASN menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan konsisten pada kategori baik hingga istimewa. Capaian kinerja tercatat sebesar 108,53% pada tahun 2021, 106,52% pada tahun 2022, 115,12% pada tahun 2023, 106% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 108,25% pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Fluktuasi capaian tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan SDM aparatur, namun secara keseluruhan tetap berada di atas target dan menunjukkan keberlanjutan upaya peningkatan profesionalitas ASN.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 mencapai 87,7, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 86,9, serta lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 82,02 dan tahun 2021 sebesar 73. Namun demikian, capaian tahun 2025 relatif lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 89,8 sebagaimana disajikan pada Tabel 23. Dalam perspektif lima tahun terakhir, kinerja Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2021, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin ASN di lingkungan Stasiun PSDKP Biak.

**Tabel 23. Indeks profesionalitas ASN**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	81-83	81	87,7	86,9	89,8	82,02	73

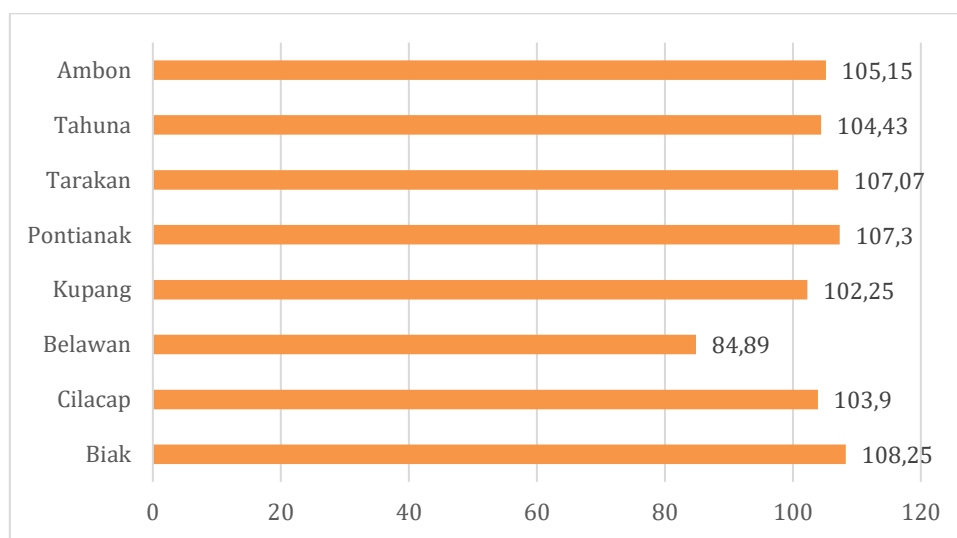
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 81–83, realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 sebesar 87,7 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN telah berada di atas standar kinerja yang direncanakan dalam dokumen strategis. Namun demikian, capaian yang melampaui target jangka menengah sejak awal periode Renstra mengindikasikan perlunya peninjauan dan penajaman target serta strategi pengembangan ASN pada tahun-tahun berikutnya agar pengukuran kinerja tetap mencerminkan peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

Ditinjau dari komponen penyusun Indeks Profesionalitas ASN, capaian IPASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak menunjukkan variasi antar dimensi penilaian. Bobot terendah dicapai pada dimensi kesesuaian kinerja sebesar 82,67%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat ASN dengan capaian kinerja individu yang belum sepenuhnya selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian organisasi untuk dilakukan penguatan pembinaan kinerja, khususnya melalui peningkatan pemahaman target kinerja, penguatan perencanaan kinerja individu, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Sementara itu, bobot tertinggi dicapai pada dimensi kesesuaian disiplin sebesar 100%, yang mencerminkan tingkat kepatuhan ASN terhadap

ketentuan disiplin, kehadiran, dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian yang sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa budaya disiplin telah terinternalisasi dengan baik di lingkungan Stasiun PSDKP Biak dan menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan profesionalitas ASN secara menyeluruh.

Secara nasional, capaian IPASN Stasiun PSDKP Biak sebesar 108,25% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya sebesar 102,91%, dengan selisih positif 5,35 poin (lihat Gambar 12). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan ASN di lingkungan Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar unit kerja sejenis. Total ASN yang mendukung capaian IPASN pada tahun 2025 sebanyak 51 orang, yang seluruhnya berkontribusi dalam penghitungan indeks profesionalitas ASN.



**Gambar 14. Capaian IPASN UPT sejenis**

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh peran aktif pegawai dalam mengikuti berbagai bentuk pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Komitmen pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi menjadi faktor utama dalam menjaga capaian IPASN tetap berada pada kategori tinggi.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi capaian IPASN, antara lain adanya pegawai yang belum sepenuhnya mengikuti arahan pimpinan dan tim kepegawaian untuk mengikuti pengembangan kompetensi, serta masih terdapat pegawai dengan capaian kinerja yang belum optimal. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan pembinaan berkelanjutan agar profesionalitas ASN dapat ditingkatkan secara merata.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Stasiun PSDKP Biak dilaksanakan melalui pengalokasian sumber daya manusia dan anggaran secara selektif pada program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan profesionalitas ASN. Optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi dan aplikasi pendukung, antara lain EMILEA KKP, serta partisipasi ASN dalam seminar, webinar, dan pendidikan serta pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait, memungkinkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara lebih efisien dari sisi biaya dan waktu. Pendekatan tersebut juga mendukung akurasi dan keterkinian data kepegawaian, sehingga pengelolaan IP ASN dapat dilakukan secara lebih terukur, terkendali, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, antara lain pengingat rutin dari tim kepegawaian kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas, serta pendampingan dalam pengunggahan data dukung sertifikat pengembangan kompetensi ke aplikasi MY ASN masing-masing pegawai. Secara keseluruhan, capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan SDM aparatur telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

#### *IK 12. Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak*

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Indikator Penilaian Mandiri SAKIP didukung oleh empat komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

- 1) Perencanaan kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja;
- 3) Pelaporan kinerja; dan
- 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Penilaian SAKIP dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja (PM SAKIP), selanjutnya hasil penilaian diverifikasi oleh tim verifikasi dari Sekretariat Ditjen PSDKP. inspektorat mitra yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2025, capaian penilaian mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Biak menunjukkan hasil yang baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 86, realisasi kinerja mencapai 87,5 (predikat A) dengan tingkat capaian sebesar 101,74% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Stasiun PSDKP Biak telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan melampaui target yang ditetapkan.

Jika ditinjau dari capaian beberapa tahun terakhir, kinerja penilaian mandiri SAKIP menunjukkan tren yang relatif stabil. Capaian kinerja tercatat sebesar 97,89% pada tahun 2023, meningkat menjadi 102,20% pada tahun 2024, dan berada pada tingkat 101,74% pada tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dan

konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada beberapa komponen penilaian.

Realisasi Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 mencapai 87,5, mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 85,9 dan menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 78,8 sebagaimana disajikan pada Tabel 24. Dalam perspektif beberapa tahun terakhir, kinerja SAKIP menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja internal. Peningkatan capaian tahun 2025 mengindikasikan semakin baiknya pemahaman dan implementasi prinsip akuntabilitas kinerja di lingkungan satuan kerja.

**Tabel 24. Realisasi PM SAKIP**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	88-88,8	86	87,5	85,9	78,8		

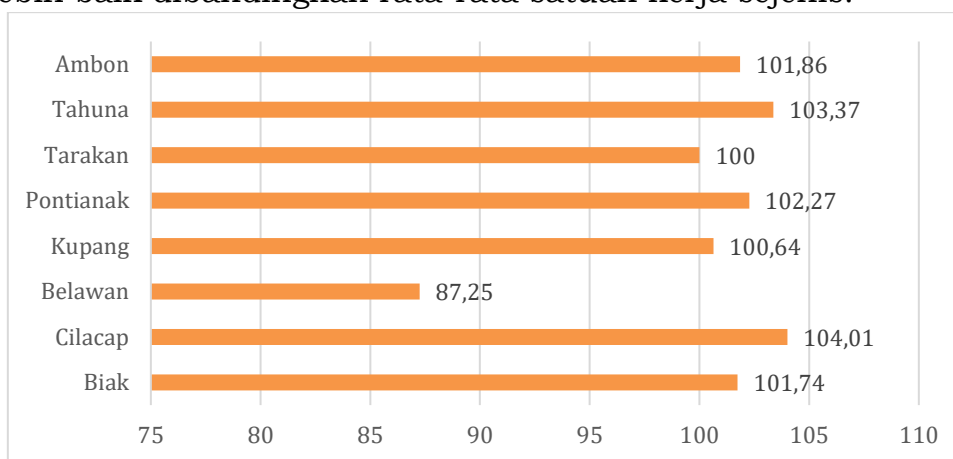
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang nilai 88–88,8, realisasi Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2025 sebesar 87,5 masih berada sedikit di bawah batas bawah target Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja SAKIP telah mengalami peningkatan yang signifikan, masih diperlukan penguatan pada aspek-aspek tertentu, khususnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan serta peningkatan kualitas, agar capaian SAKIP pada tahun-tahun berikutnya dapat sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan.

Capaian penilaian mandiri SAKIP tahun 2025 didukung oleh kinerja pada masing-masing komponen penilaian. Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja masing-masing memperoleh nilai 27,60, atau sebesar 92% dari bobot, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pengukuran kinerja telah disusun dan dilaksanakan secara cukup baik dan selaras dengan sasaran serta indikator kinerja yang ditetapkan. Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,30, atau sebesar 82% dari bobot, yang mencerminkan bahwa pelaporan kinerja telah dilaksanakan, namun masih memerlukan peningkatan kualitas analisis dan keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya. Sementara itu, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20, atau sebesar 80% dari bobot, yang menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi internal telah berjalan, namun pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja belum sepenuhnya optimal. Nilai komponen PM SAKIP dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 15.

**Tabel 25. Nialai komponen PM SAKIP**

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025
Perencanaan kinerja	30,00	27,60
Pengukuran kinerja	30,00	27,60
Pelaporan kinerja	15,00	12,30
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25,00	20,00
<b>Total Nilai</b>		<b>87,50</b>

Secara nasional, capaian penilaian mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Biak sebesar 101,74% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP lainnya sebesar 100,14%, dengan selisih positif 1,60 poin (lihat Gambar 14). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan rata-rata satuan kerja sejenis.

**Gambar 15. Capaian PM SAKIP UPT sejenis**

Adapun faktor yang masih menjadi penghambat dalam optimalisasi penerapan SAKIP antara lain belum seluruh pegawai memiliki pemahaman dan kepedulian yang memadai terhadap hasil pengukuran kinerja, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja. Kondisi ini menjadi perhatian organisasi untuk dilakukan penguatan internalisasi SAKIP, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2025 dilakukan melalui mekanisme penilaian tanpa tatap muka, dengan memanfaatkan fasilitas Google Drive sebagai media pengumpulan dan verifikasi dokumen. Pendekatan ini memungkinkan proses penilaian dilaksanakan secara lebih hemat biaya dan waktu, mengurangi kebutuhan perjalanan dinas serta penggunaan sarana pendukung fisik, sekaligus tetap menjamin keterpenuhan dan keterlacakan dokumen pendukung. Pemanfaatan media digital tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan penilaian mandiri serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas proses evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, capaian Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola kinerja organisasi. Ke depan, peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi internal diharapkan dapat semakin memperkuat implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

### *IK 13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan oleh satuan kerja melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, hasil pengendalian diverifikasi dan dinilai oleh tim Sekretariat Ditjen PSDKP.

Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi kinerja juga mencapai 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Capaian ini konsisten dengan capaian pada tahun 2024 dan 2023, yang masing-masing juga mencapai 100%, sehingga menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko pada tahun 2025 konsisten dengan capaian pada tahun-

tahun sebelumnya sebesar 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 26. Dalam perspektif lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan konsisten, mencerminkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan pengendalian risiko yang memadai dan sesuai dengan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan. Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko telah terinternalisasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.

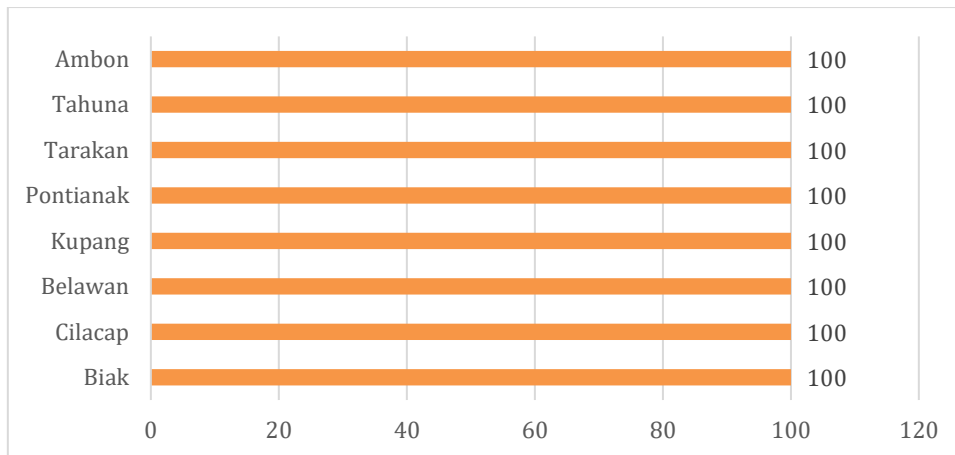
**Tabel 26. Realisasi pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Biak	100	100	100	100	100		

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 100, realisasi kinerja tahun 2025 telah sepenuhnya memenuhi target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko telah berjalan sesuai standar yang direncanakan sejak awal periode Renstra. Namun demikian, capaian yang secara konsisten berada pada nilai maksimum mengindikasikan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas dan kedalaman pengendalian risiko, agar penerapan manajemen risiko tidak bersifat administratif semata, tetapi tetap adaptif terhadap dinamika risiko operasional dan strategis di masa mendatang.

Pada tahun 2025, jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak 15 risiko, dan seluruh risiko tersebut telah dilakukan pengendalian. Pengendalian risiko dilaksanakan terhadap seluruh risiko yang terpetakan, dan secara umum berhasil dikendalikan dengan baik. Sebagian besar pengendalian risiko dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana pengendalian. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang mengalami penyesuaian jadwal pengendalian (addendum) seiring dengan adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat pula risiko yang harus dikendalikan lebih awal dari jadwal karena pelaksanaan kegiatan yang bersifat kasuistik, seperti pada kegiatan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP).

Jika dibandingkan secara nasional, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang seragam. Seluruh UPT Stasiun PSDKP, termasuk Stasiun PSDKP Biak, mencatat capaian sebesar 100%, sehingga rata-rata capaian nasional juga berada pada angka 100%, tanpa selisih capaian antar unit kerja (lihat Gambar). Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan manajemen risiko telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan pada UPT sejenis.



**Gambar 16. Capaian pengendalian kehiatan berbasis manajemen risiko**

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh peran aktif Tim Manajemen Risiko yang secara konsisten mengingatkan tim kerja teknis untuk memperhatikan dan mengendalikan risiko pada setiap pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penguatan peran pengendalian risiko dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa potensi risiko dapat diminimalkan dan tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja.

Meskipun capaian indikator telah tercapai secara penuh, masih terdapat kendala yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum optimalnya pendokumentasian bukti dukung pengendalian risiko oleh tim kerja teknis. Pada beberapa kegiatan, pengendalian risiko telah dilaksanakan namun belum seluruhnya didukung dengan dokumentasi yang memadai. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas administrasi manajemen risiko ke depan.

Secara keseluruhan, capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko tahun 2025 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak telah menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan. Ke depan, penguatan pada aspek dokumentasi dan pelaporan pengendalian risiko diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

#### *IK 14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan*

Indikator Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan menggambarkan tingkat kepatuhan dan komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor 63/DJPSDKP.1/TU.140/I/2026, Stasiun PSDKP Biak memiliki 8 (delapan) rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti. Seluruh rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sampai dengan tuntas dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan.

Pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi kinerja mencapai 100%, dengan tingkat capaian sebesar 105,26% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Biak telah ditindaklanjuti dan didukung dengan dokumen yang lengkap serta disampaikan sesuai ketentuan.

Realisasi indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada tahun 2025 mencapai 100, sama dengan realisasi tahun 2024 dan tahun 2022, serta menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 75 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 27. Dalam perspektif lima tahun terakhir, kinerja indikator ini menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung membaik, di mana capaian tahun 2025 mencerminkan pemulihan dan penguatan efektivitas mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan unit kerja dalam melengkapi dan menyampaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

**Tabel 27. Realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dilengkapi**

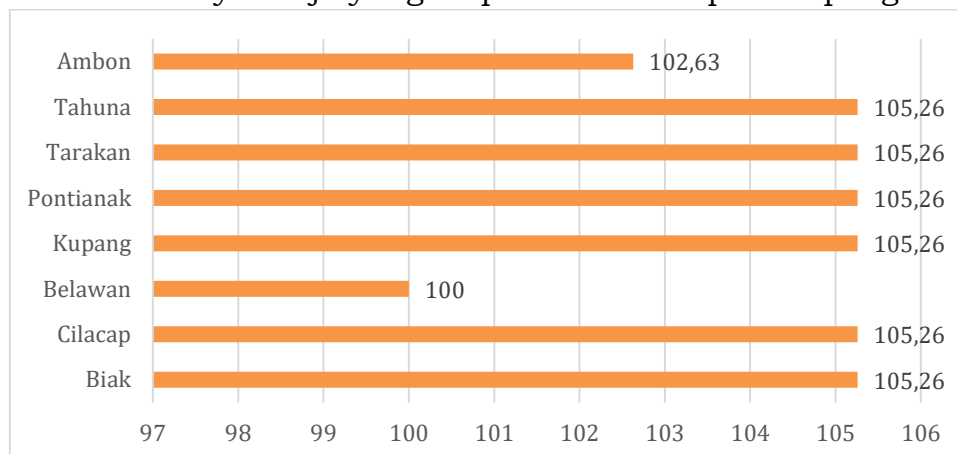
Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95-99	95	100	100	75	100	

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada kisaran 89–95, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan telah berada di atas standar kinerja yang direncanakan dalam dokumen strategis. Namun demikian, capaian yang secara konsisten berada di atas target jangka menengah mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap tingkat ambisi target dan penguatan kualitas rekomendasi serta efektivitas tindak lanjutnya, agar indikator tetap mencerminkan peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan dan tidak sekadar mempertahankan capaian administratif.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan kondisi yang konsisten dan stabil pada kategori sangat baik. Pada tahun 2022 dan 2024, capaian indikator masing-masing tercatat sebesar 120%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 100% sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Pada tahun 2025, meskipun capaian menurun secara proporsional menjadi 105,26%, namun tetap berada di atas target dan mencerminkan kesinambungan kualitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Fluktuasi capaian tersebut

lebih mencerminkan dinamika jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti setiap tahun, tanpa mengurangi tingkat kepatuhan unit kerja.

Secara nasional, capaian indikator Stasiun PSDKP Biak sebesar 105,26% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP sejenis sebesar 104,27%, dengan selisih positif 0,99 poin (lihat Gambar 16). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan rata-rata unit kerja sejenis, serta mencerminkan budaya kerja yang responsif terhadap hasil pengawasan.



**Gambar 17. Capaian tindak lanjut rekomendasi UPT sejenis**

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang intensif antara Stasiun PSDKP Biak dengan tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, khususnya dalam proses pelengkapan dan verifikasi dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Koordinasi yang berjalan secara aktif dan berkelanjutan tersebut memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat rekomendasi yang tertunda atau tidak terdokumentasi dengan baik.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Stasiun PSDKP Biak dilakukan melalui pengelolaan proses yang terkoordinasi, terencana, dan berbasis prioritas. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara terpusat dengan memanfaatkan koordinasi intensif antara Stasiun PSDKP Biak dan Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP, sehingga proses pelengkapan, verifikasi, dan penyampaian dokumen dapat dilaksanakan tanpa pengulangan pekerjaan dan tanpa pemborosan sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian seluruh rekomendasi secara tepat waktu dengan penggunaan sumber daya manusia dan anggaran yang proporsional. Efisiensi juga tercermin dari kemampuan unit kerja dalam menyesuaikan beban kerja dengan dinamika jumlah rekomendasi setiap tahun, tanpa mengurangi kualitas kelengkapan dokumen maupun kepatuhan terhadap ketentuan, sehingga mendukung tercapainya kinerja tindak lanjut rekomendasi secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di lingkungan

Stasiun PSDKP Biak telah berjalan efektif, tertib administrasi, dan akuntabel. Konsistensi capaian di atas target menjadi bukti komitmen unit kerja dalam mendukung perbaikan tata kelola, peningkatan kinerja organisasi, serta penguatan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### *IKU 15. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala. SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat (NKM) pengguna layanan publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari target nilai yang ditetapkan sebesar 80, realisasi nilai kinerja mencapai 100 (lihat Tabel 28), dengan tingkat capaian sebesar 120% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pengguna layanan.

Realisasi Nilai Kepuasan Masyarakat (NKM) pada tahun 2025 sebesar 100, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 99,6, serta menunjukkan peningkatan yang konsisten dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 94,9, tahun 2022 sebesar 92,31, dan tahun 2021 sebesar 80 sebagaimana disajikan pada Tabel 28. Dalam perspektif lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, mencerminkan perbaikan kualitas layanan publik secara bertahap dan konsisten. Realisasi tahun 2025 yang berada pada nilai maksimal menunjukkan bahwa upaya peningkatan standar pelayanan, sarana pendukung, dan kompetensi petugas layanan telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan.

**Tabel 28. Realisasi nilai kepuasan masyarakat**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80-89,5	80	100	99,6	94,9	92,31	80

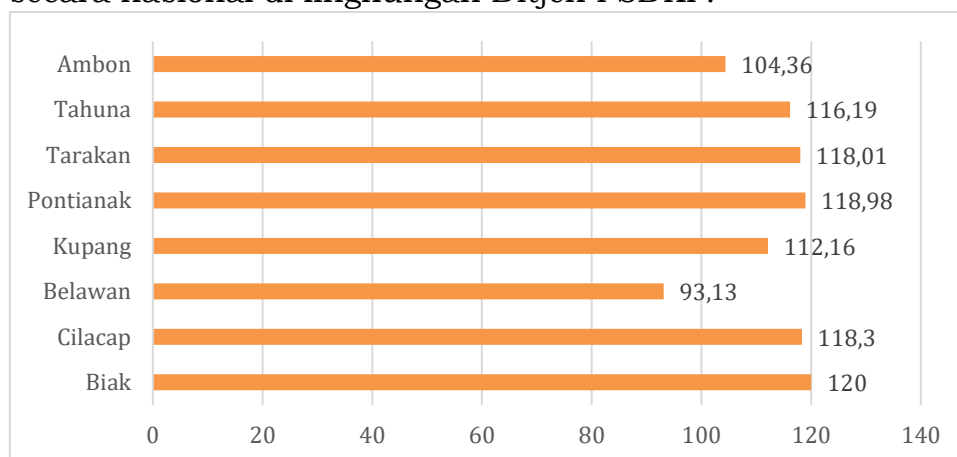
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 80–89,5, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui batas atas target Renstra secara signifikan. Capaian ini

menunjukkan bahwa kualitas layanan publik telah berada di atas standar kinerja yang direncanakan dalam dokumen strategis. Namun demikian, capaian yang telah mencapai nilai maksimum mengindikasikan perlunya peninjauan dan penajaman target serta indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya agar pengukuran kinerja tetap mampu merefleksikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan dan menghindari stagnasi capaian pada level maksimal.

Sepanjang tahun 2025, total responden survei kepuasan masyarakat berjumlah 450 responden, yang terdiri dari 444 responden laki-laki dan 5 responden perempuan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, responden terdiri dari 9 orang berpendidikan SMP, 214 orang SMA, 5 orang D3, dan 222 orang S1. Komposisi responden ini menunjukkan bahwa layanan publik Stasiun PSDKP Biak menjangkau pengguna layanan dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dan secara umum mampu memberikan kepuasan yang tinggi.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, nilai kepuasan masyarakat menunjukkan tren meningkat dan konsisten. Capaian indikator tercatat sebesar 106,43% pada tahun 2021, 115,39% pada tahun 2022, 118,15% pada tahun 2023, 120% pada tahun 2024, dan tetap 120% pada tahun 2025 (lihat Tabel 14). Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak.

Secara nasional, capaian NKM Stasiun PSDKP Biak sebesar 120% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP sejenis sebesar 112,64%, dengan selisih positif 7,36 (lihat Gambar 17). Hal ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai salah satu unit kerja dengan kinerja pelayanan publik terbaik secara nasional di lingkungan Ditjen PSDKP.

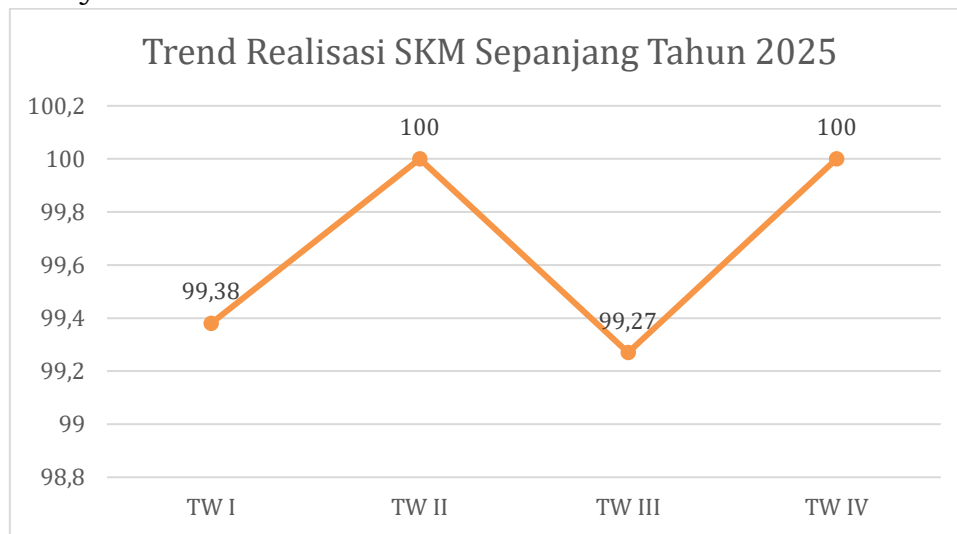


**Gambar 18. Capaian NKM UPT sejenis**

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai, pemanfaatan aplikasi e-SLO dan Biak Go Link yang mendukung kemudahan dan kecepatan pelayanan, serta kompetensi SDM petugas pelayanan yang sesuai ketentuan dan berorientasi pada pelayanan prima. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan publik masih menghadapi kendala berupa belum

tersedianya pos pelayanan terpadu (satu atap) di pelabuhan perikanan serta masih adanya sebagian pengguna layanan yang belum memahami mekanisme penyampaian pengaduan melalui aplikasi SP4N-Lapor.

Tindakan yang diambil dalam mempertahankan capaian kinerja ini, Stasiun PSDKP Biak secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi hasil SKM secara berkala sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat tren realisasi NKM sepanjang tahun 2025 berkisar antara 99-100 (lihat Gambar 18). Secara keseluruhan, capaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan publik di lingkungan Stasiun PSDKP Biak telah berjalan sangat baik, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.



**Gambar 19. Tren NKM sepanjang tahun 2025**

#### *IK 16. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 75, realisasi kinerja mencapai 87,90, dengan tingkat capaian sebesar 117,20% sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Realisasi

tersebut menempatkan hasil pengawasan kearsipan internal pada kategori A (memuaskan) dan menunjukkan adanya kepedulian pengelolaan arsip.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, nilai pengawasan kearsipan internal mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2024, capaian indikator tercatat sebesar 119,04%, walaupun pada tahun 2025 mengalami penurunan capaian tetap berada pada tingkat yang tinggi dengan capaian 117,20% (lihat Tabel 20). Kondisi ini mencerminkan konsistensi penerapan pengelolaan kearsipan yang baik dan berkelanjutan di lingkungan Stasiun PSDKP Biak.

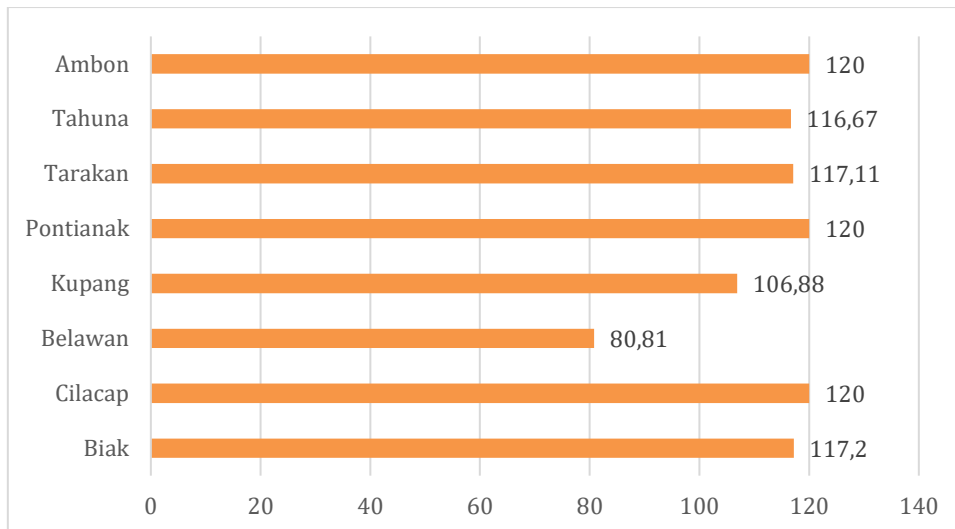
Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mulai diterapkan pada tahun 2024, sehingga perbandingan kinerja secara historis baru dapat dilakukan untuk dua tahun terakhir. Realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 87,9, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 83,3. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan kearsipan internal, khususnya dalam pemenuhan aspek sarana dan prasarana, penciptaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Karena indikator ini belum tersedia sebelum tahun 2024, evaluasi tren lima tahun terakhir belum dapat dilakukan secara penuh. Namun demikian, peningkatan capaian dari tahun pertama implementasi ke tahun 2025 menunjukkan arah perbaikan yang positif dan konsisten.

**Tabel 29. Realisasi pengawasam kearsipan internal**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak	80-84	75	87,9	83,3			

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 80–84, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 87,9 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan kearsipan internal telah berada di atas standar kinerja yang direncanakan dalam dokumen strategis. Namun demikian, capaian yang melampaui target jangka menengah sejak awal periode Renstra mengindikasikan perlunya peninjauan kembali target dan indikator kinerja kearsipan pada tahun-tahun berikutnya, agar pengukuran kinerja tetap mampu mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip secara berkelanjutan dan tidak hanya mempertahankan capaian pada level optimal.

Secara nasional, capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP sejenis sebesar 112,33%, dengan selisih positif 4,87 poin (lihat Gambar 20). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan kearsipan internal di Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar unit kerja sejenis di lingkungan Ditjen PSDKP.



**Gambar 20. Capaian nilai pengawasan kearsipan UPT sejenis**

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai, serta penerapan praktik pengelolaan arsip yang telah berjalan dengan baik, mulai dari penciptaan arsip, pemeliharaan arsip, hingga penyusutan arsip sesuai ketentuan. Pengisian data dukung penilaian kearsipan internal juga dilakukan berdasarkan kondisi nyata sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia di Stasiun PSDKP Biak.

Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan kearsipan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM kearsipan, khususnya belum tersedianya arsiparis dan belum adanya pengelola arsip yang telah mengikuti sertifikasi SDM kearsipan. Kondisi ini menjadi perhatian untuk penguatan kapasitas SDM agar kualitas pengelolaan kearsipan dapat terus ditingkatkan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut, Tim Pengelola Arsip secara konsisten melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pembuatan persuratan setiap semester, guna memastikan seluruh naskah dinas disusun sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku. Secara keseluruhan, capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Stasiun PSDKP Biak telah berjalan efektif dan akuntabel, serta memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola administrasi dan kinerja organisasi.

#### *IK 17. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak*

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Indikator Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari target nilai yang ditetapkan sebesar 77, realisasi nilai kinerja mencapai 79,55 (lihat Tabel 30), dengan tingkat capaian sebesar 103,31% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan Stasiun PSDKP Biak telah berjalan efektif dan memberikan nilai tambah nyata dalam mendukung tata kelola layanan administrasi satuan kerja.

Jika ditinjau dari capaian beberapa tahun terakhir, indikator ini menunjukkan konsistensi kinerja yang baik. Pada tahun 2022 hingga 2024, capaian indikator tercatat stabil pada angka 100%, dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 103,31% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penguatan kualitas inovasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan efektivitas proses kerja.

Indikator Nilai Inovasi Pelayanan Publik mulai digunakan pada tahun 2023, sehingga perbandingan kinerja secara historis belum dapat dilakukan secara utuh dalam rentang lima tahun. Selain itu, terdapat perubahan pola dan metodologi perhitungan indikator pada periode implementasinya, yang menyebabkan capaian tahun 2023 dan 2024 tidak sepenuhnya sebanding secara langsung dengan capaian tahun 2025. Dalam konteks tersebut, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 79,6 lebih tepat dipahami sebagai baseline kinerja yang telah distabilkan berdasarkan mekanisme penilaian terbaru. Dengan demikian, analisis tren antar-tahun dilakukan secara terbatas dan bersifat kualitatif, dengan fokus pada konsistensi penerapan inovasi serta pemenuhan kriteria penilaian yang berlaku pada tahun berjalan.

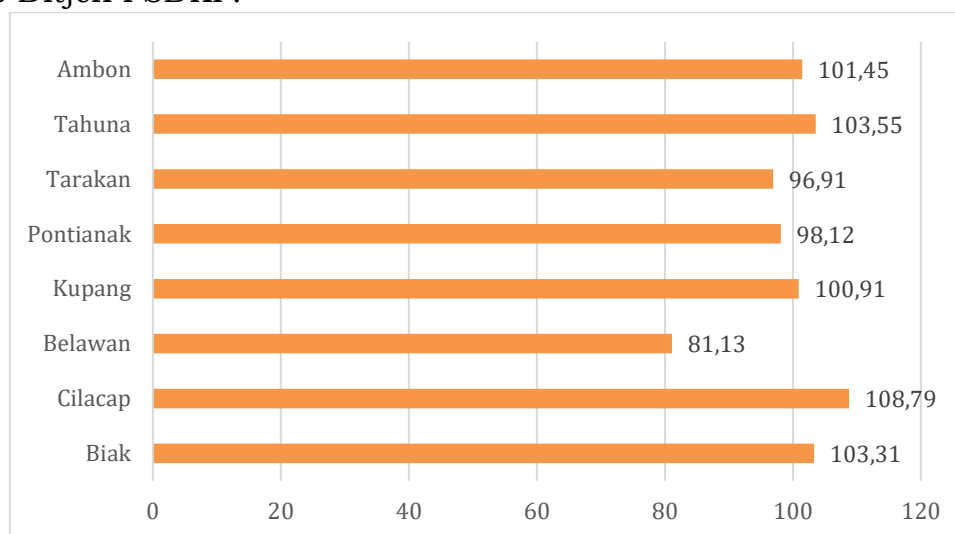
**Tabel 30. Realisasi inovasi Stasiun PSDKP Biak**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	77-80	77	79,6	1	1		

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 77–80, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 79,6 telah melampaui target tahunan (77) dan berada dalam kisaran optimal target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang diterapkan oleh Stasiun PSDKP Biak telah memenuhi ekspektasi kinerja strategis sejak awal periode Renstra. Namun demikian, mengingat indikator ini relatif baru dan telah mengalami penyesuaian metodologi, diperlukan penguatan konsistensi penerapan inovasi, pendalaman dampak inovasi terhadap kualitas layanan, serta penajaman indikator outcome, agar capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Secara nasional, capaian Nilai Inovasi Pelayanan Publik Stasiun PSDKP Biak sebesar 103,31% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP

lainnya sebesar 99,27%, dengan selisih positif 4,04 poin (lihat Gambar 20). Hal ini menempatkan Stasiun PSDKP Biak sebagai salah satu unit kerja dengan kinerja inovasi lebih baik dibandingkan rata-rata UPT sejenis di lingkup Ditjen PSDKP.



**Gambar 21. Capaian nilai inovasi UPT sejenis**

Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada tahun 2025 adalah TEPAT (Transformasi Elektronik Pertanggungjawaban Terintegrasi). Inovasi ini lahir sebagai solusi atas permasalahan pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, yang berimplikasi pada lambatnya penyelesaian SPJ, tingginya risiko kesalahan administrasi, penggunaan kertas yang berlebihan, serta potensi temuan audit akibat keterlambatan dan ketidaktertiban dokumen.

Melalui inovasi TEPAT, Stasiun PSDKP Biak mengoptimalkan pemanfaatan sistem resmi yang telah tersedia, yaitu Google Form SPJ, Dashboard Monitoring SPJ, Tanda Tangan Elektronik (TTE), Repository resmi KKP/Google Drive, serta aplikasi SAKTI. Integrasi sistem tersebut memungkinkan seluruh proses SPJ, mulai dari pengajuan, verifikasi, validasi, hingga pengarsipan, dilaksanakan secara digital dan terintegrasi.

Hasil implementasi inovasi TEPAT menunjukkan dampak yang signifikan. Sebanyak 100% SPJ Triwulan III-IV Tahun 2025 telah diproses secara digital dan ditandatangani secara elektronik, dengan percepatan waktu penyelesaian lebih dari 40% dibandingkan sebelum penerapan inovasi. Seluruh dokumen SPJ tersimpan secara tertib dalam repository resmi KKP, serta tingkat kepuasan pengguna internal mencapai 100% dengan kategori puas.

Secara keseluruhan, inovasi TEPAT memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja, transparansi, akuntabilitas, serta penghematan biaya operasional, khususnya pengurangan penggunaan ATK dan biaya cetak. Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, penerapan TEPAT didukung oleh SOP resmi, pembentukan tim efektif, pelaksanaan monitoring berkala, serta strategi penguatan budaya kerja digital di lingkup Stasiun PSDKP Biak. Capaian ini menunjukkan bahwa inovasi layanan administrasi telah menjadi

instrumen penting dalam mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola organisasi.

#### *IK 18. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja*

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang istimewa. Dari target nilai yang ditetapkan sebesar 70, realisasi nilai kinerja mencapai 82,70, dengan tingkat capaian sebesar 118,14% sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai budaya kerja telah diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas organisasi di lingkungan Stasiun PSDKP Biak.

Jika ditinjau dari capaian beberapa tahun terakhir, kinerja indikator ini menunjukkan tren yang relatif stabil dan berada pada kategori sangat baik. Pada tahun 2022 dan 2023, capaian indikator tercatat sebesar 120%, kemudian pada tahun 2024 sebesar 115,79%, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 118,14% sebagaimana disajikan pada Tabel 20. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa program budaya kerja telah menjadi bagian dari keseharian organisasi, meskipun masih terdapat dinamika dalam pelaksanaannya.

Realisasi Nilai Implementasi Program Budaya Kerja pada tahun 2025 mencapai 82,7, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 81,1. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan dalam dua tahun terakhir, khususnya setelah dilakukan penyempurnaan tata kelola implementasi budaya kerja. Adapun realisasi pada tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 25,84 dan 27,3 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2024–2025, karena terdapat perbedaan metode perhitungan dan instrumen penilaian yang digunakan. Oleh karena itu, tren kinerja yang relevan untuk dianalisis adalah periode 2024–2025, yang menunjukkan arah perbaikan signifikan dan stabil. Dengan demikian, capaian tahun 2025 mencerminkan peningkatan kualitas implementasi program budaya kerja pasca-penyempurnaan metodologi, serta menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai budaya kerja mulai berjalan lebih efektif dalam mendukung kinerja organisasi.

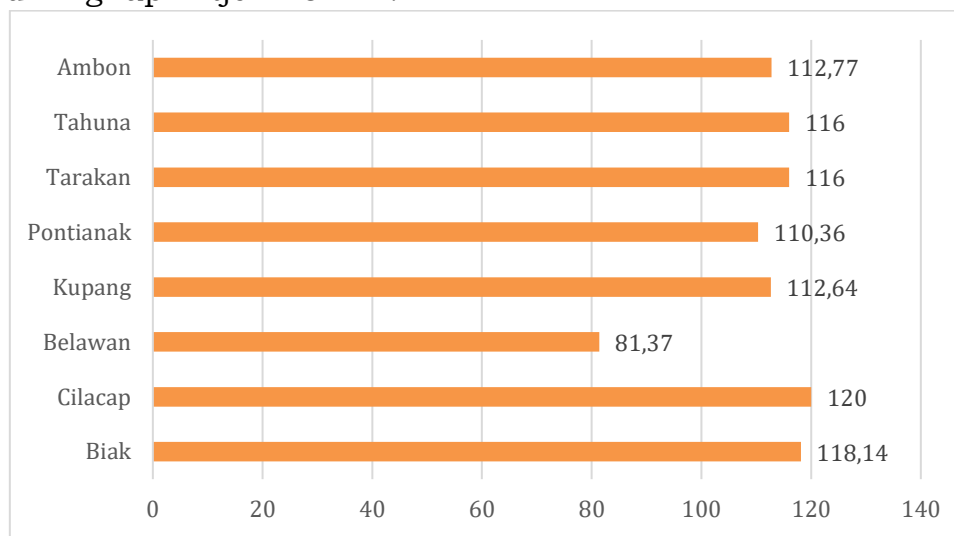
**Tabel 31. Realisasi implementasi budaya kerja**

Sasaran/Indikator Kinerja	Renstra 2025- 2029	Target 2025	Realisasi				
			2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70-74	70	82,7	81,1	27,3	25,84	

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 yang ditetapkan pada rentang 70–74, realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 82,7 telah melampaui batas atas target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi program budaya kerja telah berada di atas ekspektasi kinerja strategis yang direncanakan. Namun demikian, capaian yang secara konsisten melampaui target jangka menengah perlu diikuti dengan evaluasi

terhadap relevansi dan tingkat ambisi target Renstra, serta penguatan aspek kualitas dan dampak implementasi budaya kerja, agar peningkatan kinerja tidak bersifat administratif semata tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku kerja dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Secara nasional, capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Biak sebesar 118,14% berada di atas rata-rata capaian UPT PSDKP sejenis sebesar 110,91%, dengan selisih positif 7,23 poin (lihat Gambar 21). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi budaya kerja di Stasiun PSDKP Biak relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar unit kerja sejenis di lingkup Ditjen PSDKP.



**Gambar 22. Capaian Implementasi Program Budaya Kerja UPT sejenis**

Berdasarkan hasil penilaian implementasi Program Budaya Kerja, terdapat tiga komponen yang belum mencapai bobot maksimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, yaitu Tim Satker, Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), dan Tegakkan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT).

**Tabel 32. Capaian komponen implementasi budaya kerja**

Komponen Penilaian		BOBOT	NILAI
<b>I</b>	Tim Satker (Bobot 5 %)	5	4
<b>II</b>	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU) (Bobot 20%)	20	7
<b>III</b>	Lima Menit Sebelum Jadwal (Bobot 5%)	5	5
<b>IV</b>	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5 R) (Bobot 8%)	8	8
<b>V</b>	Upayakan Data Terkini (UPDATE) (Bobot 6 %)	6	6
<b>VI</b>	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) (Bobot 6%)	6	6
<b>VII</b>	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) (Bobot 10%)	10	6,7
<b>VIII</b>	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) (Bobot 10%)	10	10
<b>IX</b>	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) (Bobot 6%)	6	6
<b>X</b>	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) (Bobot 9%)	9	9
<b>XI</b>	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) (Bobot 10%)	10	10
<b>XII</b>	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) (bobot 5%)	5	5

Pada komponen Tim Satker, capaian belum optimal menunjukkan perlunya penguatan peran dan konsistensi tim dalam mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program budaya kerja. Selanjutnya, pada komponen HIU, rendahnya capaian mencerminkan masih terbatasnya inovasi yang dihasilkan oleh unit kerja, sehingga perlu didorong peningkatan kreativitas, ruang partisipasi, dan mekanisme fasilitasi inovasi bagi pegawai. Adapun pada komponen TAAT, capaian yang belum maksimal menunjukkan perlunya penguatan internalisasi nilai kepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi melalui keteladanan pimpinan, pengawasan internal, serta pembiasaan penerapan aturan dalam setiap proses kerja. Perbaikan terhadap ketiga komponen tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi budaya kerja secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan program budaya kerja di Stasiun PSDKP Biak didukung oleh internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang secara rutin disampaikan dalam apel pagi, serta penguatan pada kegiatan rapat internal. Penyampaian yang berulang dan konsisten tersebut membantu membangun pemahaman bersama serta menjaga komitmen pegawai dalam menerapkan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Namun demikian, pelaksanaan program budaya kerja masih menghadapi beberapa kendala. Tim fasilitator dan sekretariat program budaya kerja belum melaksanakan seluruh tugas secara optimal, sehingga sebagian kegiatan belum berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, belum terdapat pegawai yang mampu menghasilkan sumbang saran sebagai wujud partisipasi aktif dalam pengembangan budaya kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi budaya kerja masih perlu diperkuat, khususnya pada aspek partisipasi dan peran aktif pegawai.

Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak telah berhasil menanamkan nilai-nilai budaya kerja dalam aktivitas organisasi. Ke depan, penguatan peran tim fasilitator dan sekretariat serta peningkatan partisipasi pegawai diharapkan dapat lebih mengoptimalkan implementasi program budaya kerja secara berkelanjutan.

Pelaksanaan penilaian Implementasi Program Budaya Kerja pada tahun 2025 dilakukan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan media digital berupa Google Drive sebagai sarana pengumpulan dan verifikasi dokumen. Pendekatan ini terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya dalam penghematan anggaran perjalanan dinas, waktu kerja, serta pemanfaatan SDM. Mekanisme pengumpulan dokumen secara daring memungkinkan proses penilaian berjalan lebih cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus meminimalkan duplikasi aktivitas dan biaya operasional. Dengan demikian, penerapan metode digital ini mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas proses penilaian dan akuntabilitas hasil evaluasi.

### 3.1 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Inovasi TAAT

Transformasi Elektronik Pertanggungjawaban Terintegrasi (TAAT) mempercepat waktu penyelesaian SPj lebih dari 40%.

2. WA Group Layanan Kedatangan dan keberangkatan

Meningkatkan komunikasi dalam pemberian layanan publik, serta menjadi sarana sosialisasi singkat update terkini terkait ketentuan kelautan dan perikanan khususnya untuk kapal ikan.

3. Pemanfaatan Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2025, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.

4. Pemanfaatan aplikasi ZOOM

Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.

5. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur

sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

6. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.

7. Belanja *online shop*

Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.



# PENUTUP

## VI. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak untuk periode tahun berjalan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan IV tahun 2025 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 113,72% dan kategori "**Istimewa**"; dan
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

### 4.2 Rekomendasi

1. Tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak diharapkan dapat melakukan perhitungan capaian kinerja secara mandiri sebagai data dukung sementara dalam waktu menunggu hasil perhitungan timja pusat.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [diti@npsdkp@kkp.go.id](mailto:diti@npsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Erwin  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

  
Pung Nugroho Saksono

  
Mochamad Erwin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	1. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	2. Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
3.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	3. Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		4. Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
4.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100
5.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	81
		7. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	81
6.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	94
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Biak	71,5
		10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92
		11. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Biak	81
		12. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Biak	86
		13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Biak	100
		14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak	95

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	
15		Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	88,5
16		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak (nilai)	80
17		Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	1
18		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

## Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
a.	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	8.134.187.000
b.	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	196.455.000
c.	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	590.747.000
2.	Program Dukungan Manajemen	10.948.983.000
<b>Total Anggaran Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025</b>		<b>19.870.372.000</b>

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak



Mochamad Erwin

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025\_Revisi**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [dijjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:dijjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Erwin  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Mochamad Erwin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK**


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	1. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
3.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	3. Indeks operasi kapal pengawas	92
		4. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92
		5. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	80
4.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	6. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81
		7. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81
5.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	8. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	81
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Biak	71,5
		10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92
		11. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Biak	81
		12. Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Biak	86
		13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Biak	100%
		14. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		15 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80
		16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak	75
		17 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	77
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

## Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	9.453.118.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	81.418.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	135.041.000
2.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9.801.181.000
	<b>Total Anggaran Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025</b>	<b>19.470.758.000</b>

Jakarta, 17 Desember 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan  
Pung Nugroho SaksionoPIHAK PERTAMA  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak  
Mochamad Erwin

## Lampiran 3. Penghargaan Tahun 2025





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 1169/DJPSDKP/KP.540/XII/2025

Diberikan Kepada:

**Stasiun PSDKP Biak**

Sebagai :

**Inovator**

Lomba Inovasi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, dengan Judul Inovasi  
**TEPAT (Transformasi Elektronik Pertanggungjawaban Terintegrasi)**

Jakarta, 22 Desember 2025  
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO A.Pi, M.M.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara